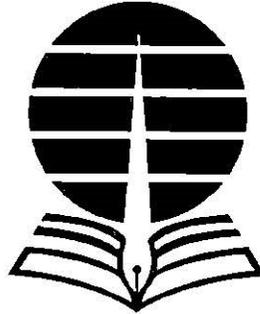


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI KEBIJAKAN PENYALURAN DAN
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DI WILAYAH PULAU NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

IBRAHIM

NIM. 500895636

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRACT

**EVALUATION OF DISTRIBUTION POLICY
AND MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL HELP AID IN THE
NUNUKAN ISLAND
KABUPATEN NUNUKAN**

Ibrahim

ibrahim.pps3@gmail.com

Universitas Terbuka

The purpose of this research is to know and describe the Policy of Distribution and Management of School Operational Assistance Fund, to know and analyze the evaluation of the policy of Disbursement and Management Policy of School Opportunity Fund (BOS) in Nunukan Island Region of Nunukan Regency by viewing or measuring its evaluation using evaluation criteria such as effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy, as well as to analyze the supporting and inhibiting factors in the distribution and management of School Operational Assistance (BOS) Fund in the Nunukan Island area of Nunukan Regency. This research uses descriptive method with qualitative approach. Data and information obtained through observation techniques, documentation and in-depth interviews with key informants and supporting informants. Determination of informants using purposive techniques with the object research of SD Negeri 1 Nunukan Selatan and SMP Negeri 1 Nunukan. Data analysis through data reduction stages, presentation of data, and drawing conclusions / verification. The results show that School Operational Assistance (BOS) is a public policy that effectively meets the needs of the community related to the cost of education issues, while viewed from the implementation aspect, the stages of activity as set forth in the Journal of School Opportunity Technical Assistance (JUKNIS BOS) have been well implemented. Furthermore, the policy evaluation of the research results shows that the evaluation criteria consisting of effectiveness, efficiency, leveling, responsiveness and accuracy have been achieved well in accordance with the objectives set out in the Journal of Technical Directives (JUKNIS), but for the criteria of adequacy, the amount of School Operational Assistance (BOS) aid has not been able to meet the operational needs of the school so that the need to increase the budget. Furthermore, in relation to the supporting and inhibiting factors of the implementation of School Operational Assistance (BOS), the results of the research indicate that the supporting factors are: implementing commitment, stakeholder cooperation, and the substance of the School Operational Assistance (BOS) that is in the interest of the community, while the inhibiting factors are: competent human resources in the field of financial administration and information technology, lack of school support facilities (computers, internet and information dissemination media), and the lack of parents participation.

**Keywords: Evaluation, School Operational Assistance (BOS),
Distribution, Nunukan District**

ABSTRAK**EVALUASI KEBIJAKAN PENYALURAN
DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI WILAYAH PULAU NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN****Ibrahim**

ibrahim.pps3@gmail.com

Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOS di Wilayah Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan dengan melihat atau mengukur evaluasinya menggunakan kriteria evaluasi seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, serta untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOS di wilayah pulau Nunukan Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh melalui teknik observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan pendukung. Penentuan informan menggunakan teknik purposive dengan obyek penelitian SD Negeri 1 Nunukan Selatan dan SMP Negeri 1 Nunukan. Analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan / verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOS merupakan sebuah kebijakan publik yang efektif memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan permasalahan biaya pendidikan, sementara dilihat dari aspek implementasi, tahapan kegiatan sebagaimana tertuang dalam JUKNIS BOS sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya dari evaluasi kebijakan hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria evaluasi yang terdiri dari efektifitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas dan ketepatan sudah tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam JUKNIS, namun untuk kriteria kecukupan, besaran dana BOS yang dialokasikan belum mampu memenuhi kebutuhan operasional sekolah sehingga perlu penambahan besaran anggaran. Selanjutnya terkait dengan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan BOS dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukungnya : komitmen pelaksana, kerjasama stakeholder, dan substansi kebijakan BOS yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sementara faktor penghambatnya : Terbatasnya sumberdaya manusia yang kompeten dibidang administrasi keuangan dan informasi teknologi, kurangnya fasilitas penunjang sekolah (komputer, internet dan media penyebaran informasi), serta minimnya partisipasi orang tua peserta didik.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan BOS , Penyaluran , Kabupaten Nunukan

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Wilayah Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, Nopember 2017

METERAI
TEMPEL

EFF22ADF872387450

6000
ENAM RIBURUPIAH

**IBRAHIM
NIM. 500895636**

PERSETUJUAN TAPM PASCA UJIAN SIDANG

Judul TAPM : Evaluasi Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah di Wilayah Pulau Nunukan
Kabupaten Nunukan

Penyusun TAPM : IBRAHIM

NIM : 500895636

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu/09 Desember 2017

Menyetujui :

Pembimbing II,


Dr. Mustainah M., M.Si
NIP. 19630831 198803 2 001

Pembimbing I


Dr. Sofian Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

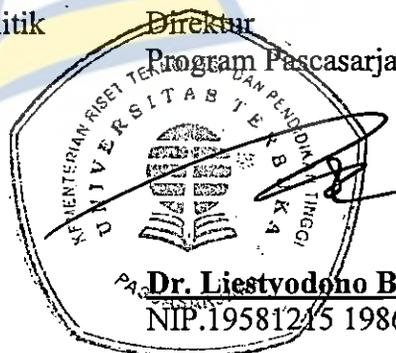
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Liestyodono B.Irianto, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : IBRAHIM
 NIM : 500895636
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana
 Bantuan Operasional Sekolah di Wilayah Pulau Nunukan
 Kabupaten Nunukan

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu/09 Desember 2017
 Waktu : 16.00 s/d 17.30 wita

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Penguji Ahli
 Nama : Prof. Dr. Ngadisah, M.A

Pembimbing I
 Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Pembimbing II
 Nama : Dr. Mustainah M., M.Si

Tandatangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Wilayah Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan” ini penulis dapat selesaikan dalam rangka memenuhi Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik.

BOS merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan pemerintah dengan tujuan membebaskan pungutan kepada peserta didik dan membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, sehingga topik ini menarik untuk diteliti dalam rangka mengetahui sejauhmana tujuan dari kebijakan BOS telah dicapai serta memberikan masukan kepada stakeholder terkait akan keberlanjutan pelaksanaan BOS kedepannya.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak terlepas dari peran banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Administrasi Publik
3. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si., selaku Pembimbing I sekaligus Kepala UPBJJ-UT Tarakan
4. Dr. Mustainah M.,M.Si selaku Pembimbing II
5. Prof. Dr. Ngadisah, M.A selaku Penguji Ahli
6. Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si selaku Dosen Pengajar
7. Dr. H. Muh. Jamal Amin, M.Si selaku Dosen pengajar
8. Dr. M. Yunus Abbas selaku Dosen Pengajar

9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan beserta seluruh jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi bagi penyelesaian TAPM ini
- 10 Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah selaku Tim Manajemen BOS Sekolah
- 11 Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Pascasarjana
- 12 Istri dan anak-anak saya serta keluarga yang telah memberikan dukungan, semangat serta spirit
- 13 Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun material dalam menyelesaikan TAPM ini.

Kritik dan saran serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan TAPM ini. Akhirnya semoga TAPM ini bermanfaat bagi semua pihak.

Salam Hormat,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstract	i
Abstrak	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Lembar Persetujuan TAPM.....	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan/Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	10
1. Kebijakan Publik	10
a. Konsep Kebijakan Publik	10
b. Formulasi atau Perumusannya.....	15
c. Implementasi Kebijakan	17
2. Evaluasi	
a. Definisi Evaluasi	18
b. Tujuan Evaluasi	23
3. Evaluasi Kebijakan	24
4. Pembiayaan Pendidikan	30
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Berpikir	36

D. Operasional Konsep	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	42
D. Instrumen Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	47
1. Profil Pendidikan di Nunukan.....	47
2. Deskripsi BOS.....	49
B. Hasil dan Pembahasan	60
1. Kebijakan Dana Bantuan Operasioan Sekolah	60
a. Kebijakan BOS	61
b. Implementasi Kebijakan	67
2. Evaluasi Kebijakan BOS.....	82
a. Efektivitas	83
b. Efisiensi	89
c. Kecukupan	94
d. Perataan	98
e. Responsivitas	102
f. Ketepatan	105
3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan BOS.....	115
a. Faktor yang Mendukung	115
b. Faktor yang Menghambat	117

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	120
1. Kebijakan BOS	120
2. Evaluasi Kebijakan BOS	121
3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan BOS.....	122
B. SARAN	123
1. Teoritis	123
2. Praktis	123
DAFTAR PUSTAKA	126
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	132
Lampiran 2 Matriks Hasil Wawancara dari Informan	134
Lampiran 3 Matriks Dokumentasi	147



DAFTAR BAGAN/GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Evaluasi Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOS.....	37
Gambar 4.1 Kondisi Sarana Prasarana SD N 1 Nunukan Selatan	66
Gambar 4.2 Kondisi Sarana Prasarana SMP N 1 Nunukan	66
Gambar 4.3 Dokumen Surat Keputusan Bupati Nunukan	70
Gambar 4.4 Dokumen Alokasi Anggaran BOS SD N 1 Nunukan	72
Gambar 4.5 Dokumen Alokasi Anggaran BOS SMP N 1 Nunukan	73
Gambar 4.6 Dokumen Penyaluran Anggaran	75
Gambar 4.7 Sarana Perpustakaan SD N 1 Nunukan Selatan	78
Gambar 4.8 Sarana Perpustakaan SMP N 1 Nunukan	78
Gambar 4.9 Surat Pertanggungjawaban Belanja BOS SDN 1 Nunukan Selatan	81
Gambar 4.10 Surat Pertanggungjawaban Belanja BOS SMP N 1 Nunukan	81



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1 Jumlah SD dan SMP di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan Tahun 2017.....	48
Tabel 4.2 Realiasi RKAS Tahun 2015, 2016 dan 2017 per Triwulan III	87
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD dan SMP di Kabupaten Nunukan Tahun 2016	106
Tabel 4.4 Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP	108



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara	131
Lampiran 2: Hasil Wawancara	133
Lampiran 3: Dokumentasi	147



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 31 ayat (1), mengamanatkan bahwa setiap warganegara Indonesiadiberikan akses untuk mengenyam pendidikan guna mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Hal tersebut mempertegas kewajiban pemerintah dalam mengupayakan akses yang mudah bagi masyarakat dalam mengenyam pendidikan seperti tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah yang tertuang dalam 14 pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hal tersebut hanya dapat dicapai jika ada akses yang baik bagi masyarakat.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 tersebut memberi penegasan bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat, bukan hanya pada golongan ekonomi kuat, namun juga golongan ekonomi lemah. Sektor pendidikan merupakan hal yang sangat penting hal ini tampak dari kenyataan bahwa dengan pendidikan yang baik maka Sumber Daya Manusia dalam suatu bangsa dapat lebih bersaing dalam berbagai kondisi termasuk dalam penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang baik diharapkan dapat menambah produktifitas Sumber Daya Manusia.

Komitmen yang kuat dari pemerintah tersebut diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan serta memberikan tekanan yang kuat pada

pengambil kebijakan untuk memberikan prioritas yang lebih pada terselenggaranya pendidikan untuk setiap warga negara Indonesia

Beberapa kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Bentuk dari kebijakan pengalokasian anggaran belanja negara sebesar 20 persen dari APBN dan APBD adalah adanya alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan pada sekolah pada tingkat dasar dan menengah pertama.

Dana BOS dialokasikan melalui sekolah untuk kemudian dikelola oleh sekolah maka Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) diberikan langsung kepada siswa miskin. Meskipun pendekatan yang dilakukan dalam pengalokasiannya berbeda, namun latar belakang adanya kebijakan BOS dan BKSM adalah kekhawatiran adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap aksesibilitas masyarakat ekonomi lemah untuk mendapatkan Pendidikan yang layak.

Pemerintah semaksimal mungkin berusaha memprioritaskan pendidikan dalam setiap pengambilan kebijakannya, namun dalam prakteknya pemerintah dihadapkan pada berbagai masalah dalam pelaksanaan kebijakannya, sehingga jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mendapat dan mengikuti pendidikan masih belum memadai.

Menurut Lembaga Penelitian Smeru (2004 : 1), secara umum saat ini pendidikan nasional dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar, yakni:

1. Rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat, baik antar wilayah antar tingkat pendapatan penduduk, maupun antar gender. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni yang berbeda-beda antar daerah di Indonesia.
2. Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, antara lain karena kurikulum yang tidak terkait dengan kebutuhan lapangan kerja, rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; dan
3. Lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan, baik di lembaga formal maupun masyarakat.

BOS tidak diberikan secara langsung kepada siswa seperti pada bentuk pengalokasian dana Bantuan Khusus Siswa Miskin. BOS di salurkan melalui rekening sekolah yang kemudian dikelola oleh sekolah. Jumlah dana yang diberikan pada sekolah dihitung sesuai dengan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. BOS merupakan kebijakan lanjutan dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk bidang pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah pada era tahun 1998-2003.

Tujuan Program BOS adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu serta meringankan biaya siswa lainnya. Program BOS merupakan penunjang bagi penuntasan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. BOS dianggap perlu untuk dikaji karena pada dasarnya subsidi merupakan kebijakan di mana masyarakat kurang mampu adalah target utama. Mengacu pada hal tersebut tentunya BOS sebagai salah satu bentuk subsidi pada sektor pendidikan perlu dikaji, sebab penetapan jumlah dana yang diberikan kepada sekolah hanya berdasarkan jumlah murid saja. Siswa mampu dan siswa yang tidak mampu memperoleh peluang yang

sama dalam mendapatkan manfaat dari BOS sebagai salah satu bentuk subsidi pendidikan.

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Termasuk di wilayah pulau Nunukan Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan juga memprogram BOS. Adapun dalam pelaksanaannya, mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/198/III/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang SD dan SMP atau Sederajat Tahun Anggaran 2015.

Penyelenggaraan program BOS di wilayah pulau Nunukan, menuntut kemampuan sekolah untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan di wilayah pulau Nunukan, akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.

Pada tahun 2015 sekolah di wilayah pulau Nunukan telah menerima dana BOS dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 5.932.860,00 untuk pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Sumber :

Dindiknas Kab. Nunukan, 2015). Adapun jumlah sekolah penerima dana BOS di wilayah Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar sebanyak 119 sekolah; dan
2. Sekolah Menengah Pertama sebanyak 38 sekolah

Sumber : Diknas Tahun 2015

Penerimaan dan pengeluaran dana BOS harus dipertanggungjawabkan penggunaannya (juknis BOS, 2017), sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran secara triwulanan jenjang pendidikan SD dan SMP. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten pada Dinas Pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa sekolah sebagian besar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir, namun pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS tidak memadai.

Masalah utama dana BOS di wilayah pulau Nunukan sejak diluncurkannya program hingga saat ini umumnya disebabkan oleh lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang cenderung tertutup. Fenomena umum yang diamati selama ini, terjadinya keterlambatan penyaluran dana ke sekolah – sekolah disebabkan berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer dana oleh pemerintah pusat serta verifikasi data oleh tim manajemen BOS daerah yang prosesnya memakan waktu yang lama. Untuk proses verifikasi dan pendataan seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari tetapi kenyataannya baru selesai dalam waktu 15 hari, sementara penyaluran BOS dari Rekening Kas Umum (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya disalurkan ke Rekening Sekolah

yang seharusnya dilakukan setiap Triwulan secara terjadwal, pada kenyataan belum sesuai dengan jadwal triwulan yang ditetapkan.

Wilayah Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan dengan kondisi letak geografis, infrastruktur, kondisi sosio ekonomi dan budaya masyarakat, kualitas sumber daya manusia aparat pemerintahan, lembaga pendidikan yang masih terbatas diindikasikan program BOS yang ada memiliki masalah, kesulitan, tantangan tersendiri yang berbeda dengan daerah lain.

Beberapa permasalahan yang mendasar terkait dengan Program BOS di wilayah pulau Nunukan pada tahun 2015, diantaranya :

1. Masih sering terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS ke beberapa Sekolah
2. Masih terdapatnya saldo sisa dana yang belum digunakan pada rekening maupun bandahara dana BOS di sekolah yang mengindikasikan kurang kemampuan manajemen sekolah dalam mengelola dana BOS.
3. Realisasi penggunaannya tidak dibuat laporan rekapitulasi klasifikasi jenis belanja sehingga tidak dapat diidentifikasi realisasi per jenis belanja sesuai dengan jenis belanja pada laporan keuangan daerah, permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan, belanja dan asset yang bersumber dari dana hibah langsung ke sekolah (BOS) tidak dapat dikonsolidasikan pada laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Belum tersedianya Petunjuk Teknis yang lebih operasional / Standard Operasional Prosedur (SOP) penatausahaan keuangan BOS

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan dan diskusi dari beberapa narasumber permasalahan tersebut terjadi dikarenakan oleh :

1. Belum adanya peraturan mengenai petunjuk teknis penatausahaan dana BOS dalam rangka konsolidasi ke laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga pemahaman terhadap isi kebijakan BOS oleh Manajemen BOS Kabupaten Nunukan maupun para kepala sekolah tidak akan komprehensif, contohnya mengenai prosedur penggunaan anggaran seperti dana BOS lebih besar dipergunakan untuk membayar honor para guru;
2. Tim manajemen BOS pada sekolah belum berfungsi dalam membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penggunaan dana;
3. Tim manajemen BOS kabupaten selaku pihak yang memonitor pelaksanaan dana BOS belum efektif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban dana tercermin dari belum adanya indikator yang jelas dalam pelaksanaan monev; dan
4. kepala dinas pendidikan belum optimal dalam melaksanakan pengawasan secara berjenjang terhadap pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) di wilayah Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan dana BOS di wilayah pulau Nunukan Kabupaten Nunukan ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOS di wilayah Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan Kebijakan BOS di Wilayah Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan
3. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOS di wilayah pulau Nunukan Kabupaten Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dari hasil penelitian berupa pengembangan implementasi dan penelitian ini juga nantinya dapat menjadi referensi serta memberikan sumbangan konseptual untuk penelitian sejenis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis berupa masukan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan penyaluran dana BOS di wilayah pulau Nunukan Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, selain itu juga dapat dipakai sebagai acuan berbagai pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dana BOS.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Islamy (2015 : 1.3) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Pandangan konsep tersebut artinya sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Sedangkan menurut Chiff J.O Udaji dalam Wahab (2012:5) mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai "*An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large*" (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Kebijakan (*policy*) meliputi aturan-aturan dari rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan dijadikan pertimbangan atas suatu masalah (Islamy, Irfan, 2001). Dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan dan diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan guna mewujudkan suatu sasaran atau

tujuan tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu dan mencegah, mengurangi atau memecahkan suatu masalah. Pada dasarnya evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui aspek proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektifitas dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jadi meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik (Nugroho, 2006 :669).

Sementara menurut Wilson dalam Wahab (2012:13), Kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan dari pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, apabila langkah-langkah yang telah diambil atau telah gagal di ambil untuk diimplementasikan, serta memberikan penjelasan-penjelasan mengenai apa yang terjadi atau tidak terjadi. Sedangkan menurut Widodo (2009, 112), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Selanjutnya Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai "*a projected program of goals, values and practices*" (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah) (1984:16) Amara Raksasataya dalam

Islamy juga mengemukakan bahwa “kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi, Islamy (1984:17-18)

Definisi lain dikemukakan oleh James Anderson “*Public policy are those policies devoleped by governmental bodies and officials*” (Islamy, 1984:19). Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas adalah: pertama, bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kedua, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Ketiga, bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Keempat, bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kelima, bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kesimpulan lain mengenai definisi kebijakan publik yang ditemukan oleh para pakar tersebut di atas juga disampaikan oleh Warella dalam modul mata kuliah prinsip-prinsip kebijakan publik, dia mengatakan bahwa setidaknya ada empat esensi yang terkandung dalam pengertian kebijakan publik yaitu, pertama kebijakan publik merupakan

penetapan tindakantindakan pemerintah. Kedua, kebijakan publik tidak hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan. Ketiga, kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Keempat, kebijakan publik harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, pengertian-pengertian kebijakan publik di atas menegaskan bahwa pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang oleh David Easton sebut sebagai "authorities in a political system" yaitu penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau perannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka menurut peneliti kebijakan publik mengandung makna, sebagai berikut :

1. segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah.
2. kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan perorangan atau kelompok/golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada pada lembaga public yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya.

3. kebijakan publik merupakan kebijakan yang nilai manfaatnya harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut RS. Parker seperti dikutip Ekowati, berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Sedangkan menurut Anderson (dalam Ekowati 2005:5) dikatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga/badan-badan Pemerintah dan Pejabat-pejabatnya.

Selanjutnya Ekowati (2005 : 6) diungkapkan bahwa implikasi definisi dari pengertian tersebut di atas adalah:

1. Bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada maksud dan tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisistindakan-tindakan atau pola tindakan Pemerintah/Pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakanutu merupakan apa yang benar-benar dilakukan Pemerintah
4. Bahwa kebijakanutu berdasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Pakar lain Nakamura dan Smallwood (Ekowati, 2005:5-6) mengatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dalam konteks kebijakan publik ini, seperti dirangkum Sunggono (1994:23-24) menyatakan, bahwa kedua ahli tersebut menyatakan sebagai semua pilihan atau tindakan dan melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan, yaitu : 1) perumusan kebijakan, 2) pelaksanaan kebijakan, 3) penilaian kebijakan atau evaluasi.

Berdasarkan pandangan Nakamura dan Smallwood tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa makna kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah guna melaksanakan suatu kegiatan yang diawali dari pembuatan atau perumusan, pelaksanaan dan penilaian atau evaluasi kebijakan.

Mengacu pada pandangan dan pengertian-pengertian dari beberapa pakar kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebijakan publik dengan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017.

b. Formulasi atau perumusannya

Proses perumusan kebijakan adalah salah satu alat penting dalam tahapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan.

Menurut Anderson (2006 : 3-5), terdapat tiga teori utama yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan yaitu:

- a. Teori rasional-komprehensif; adalah teori yang intinya mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai.
- b. Teori incremental; adalah teori yang intinya tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan.
- c. Teori mixed scanning; adalah teori yang intinya menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori inkremental.

Dengan mengutip pendapat dari Cochran dan Malone, menurut Sidney (2007 : 79) perumusan kebijakan mencoba menjawab sejumlah pertanyaan, yaitu: apa rencana untuk menyelesaikan masalah?, Apa yang menjadi tujuan dan prioritas?, Pilihan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan? Eksternalitas apa, baik positif maupun negatif yang terkait dengan setiap alternatif?

Perumusan kebijakan melibatkan proses pengembangan usulan akan tindakan yang terkait dan dapat diterima (biasa disebut dengan alternatif, proposal, atau pilihan) untuk menangani permasalahan publik. Perumusan kebijakan menurut Anderson tidak selamanya akan berakhir dengan dikeluarkannya sebagai sebuah produk peraturan perundang-undangan. Namun, pada umumnya sebuah proposal kebijakan biasanya ditujukan untuk membawa perubahan mendasar terhadap kebijakan yang ada saat ini.

Jann dan Wegrich(2007 :48) mengemukakan dua faktor utama yang menentukan alternatif kebijakan akan diadopsi menjadi kebijakan, yaitu:

- a. Penghilangan alternatif kebijakan akan ditentukan oleh sejumlah parameter substansial dasar, misalnya kelangkaan sumberdaya untuk dapat melaksanakan alternatif kebijakan. Sumberdaya ini dapat berupa sumberdaya ekonomi maupun dukungan politik yang didapat dalam proses pembuatan kebijakan.
- b. Alokasi kompetensi yang dimiliki oleh berbagai aktor juga memainkan peranan penting dalam penentuan kebijakan.

Selain itu, akademis juga memiliki peran penting sebagai penasehat kebijakan atau pemikir (*think tanks*). Pengetahuan dari para penasehat ini seringkali berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan.

c. Implementasi Kebijakan

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Nugroho, 2011 : 627) menyatakan bahwa implementasi meliputi suatu proses linier yang terdiri dari 4 (empat) variabel yang menghubungkan antara kebijakan dan kerja variabel tersebut adalah: Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi ; karakteristik dari agen pelaksana/ implementor ; kondisi sosial, ekonomi dan politik ;dan kecenderungan (*disposition*) pelaksana/ implementor. Hubungan atau perubahan pada setiap variabel tersebut dapat mempengaruhi kinerja.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
- 3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Sumber : Nugroho (2006 : 119)

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode;
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Sumber : Nugroho (2006 : 119)

Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

2. Evaluasi

a. Definisi Evaluasi

Istilah Evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi Kedua (2004:237-238) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis,

yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai.

- 1) Fokus Nilai. Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
- 2) Interpedensi Fakta – Nilai. Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada “fakta” semata namun juga terhadap “nilai”. Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat; haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.
- 3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakantindakan yang telah dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan (ex-ante).

4) Dualitas Nilai. Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena kesehatan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain). (LAN, 2004:237-238).

Menurut Yunanda dalam Febryan dkk (2016:13), Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Sehingga evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaiannya, batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria (Sudjana dalam Dimiyati dan Mudjiono, 2006:17).

Definisi lain dikemukakan oleh Stufflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2010:17) mengatakan bahwa, evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Evaluasi program adalah

upaya penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan tujuan mengkaji proses dan hasil dari suatu kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan sejauhmana hasil atau nilai yang telah dicapai program/kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002:13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Menurut Crawford (2000:30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
- b. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
- c. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
- d. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Menurut Bajary (2012:298), evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan yang lebih baik.

Arikunto (2005 :10-15) mengemukakan evaluasi program sebagai “suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program” selanjutnya dalam perspektif evaluasi hasil belajar, menyatakan bahwa fungsi penilaian meliputi: selektif, diagnostik, penempatan, pengukuran keberhasilan.

Evaluasi dapat dipilah-pilah menurut beberapa hal, seperti menurut jenis yang dievaluasi, menurut pelakunya (evaluator), menurut lingkungannya, menurut kadar kedalamannya, menurut masa atau periodenya.

Dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (2004:237-238), dikemukakan bahwa evaluasi dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, misalnya: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi yang dilakukan sebelum program berjalan, atau sedang dalam pelaksanaan, atau setelah program selesai dan dapat diteliti hasil dan dampaknya.

Menurut Siagian (1970:143-144) istilah evaluasi diartikan sebagai penilaian, yaitu: “Proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasilhasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”.

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa hakikat dari penilaian itu adalah:

- a. Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Berbeda dengan pengawasan yang ditujukan kepada fase yang masih dalam proses pelaksanaan.
- b. Penilaian bersifat korektif terhadap fase yang telah selesai dikerjakan. Mungkin akan timbul pertanyaan: Artinya, melalui penilaian harus dikemukakan kelemahan/penyimpangan/penyelewengan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru saja selesai itu.
- c. Penilaian bersifat “prescriptive”. Sesuatu yang bersifat “prescriptive” adalah yang bersifat “mengobati”.
- d. Penilaian ditujukan kepada fungsi-fungsi organik lainnya. Fungsifungsi administrasi dan manajemen itu tidak merupakan

fungsi-fungsi yang “berdiri sendiri” dalam arti lepas dari fungsi-fungsi lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa evaluasi adalah proses membandingkan antara tujuan, saran kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana kegiatan dari suatu sasaran evaluasi dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses.

b. Tujuan Evaluasi

Terdapat enam hal tujuan evaluasi yang disampaikan Sudjana (2006:48), yaitu untuk :

- 1) Memberikan masukan bagi perencanaan program;
- 2) Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
- 3) Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
- 4) Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
- 5) Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program.

Arikunto dan Jabar (2004:13) menyatakan bahwa terdapat dua macam tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Dalam hak tersebut keduanya menyarankan agar dapat melakukan tugasnya, maka seorang evaluator program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program.

Kosasih (2004 : 3) mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang

dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selanjutnya Dunn (2003 : 609) menyebutkan bahwa evaluasi bertujuan : (1) memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public, (2) memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, (3) memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi, (Dunn, 2003:609).

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut Dunn (1999:608), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Lebih lanjut Dunn dalam Subarsono (2011: 124) menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni evaluasi semu; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menayakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.

Selanjutnya evaluasi formal; yakni adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya evaluasi proses keputusan teroitis; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi

yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

Menurut Brewer dalam Subarsono (2005 :83), proses kebijakan terdiri atas 6 tahap: 1) permulaan /penanaman (invensi), 2) estimasi (perkiraan), 3) seleksi (pemilihan), 4) implementasi (penerapan), 5) evaluasi (penilaian), 6) terminasi (penyelesaian). Dalam pandangan Brewer, invensi atau permulaan mengacu pada tahap paling awal dalam rangkain tersebut ketika masalah akan dirumuskan. Dia menjelaskan bahwa tahap ini dapat digolongkan sebagai tahap perumusan masalah dan pencarian solusi. Tahap kedua adalah perkiraan yang menghitung dan memperkirakan tentang resiko, biaya, dan manfaat yang berhubungan dengan berbagai solusi yang akan diterapkan pada tahap sebelumnya.

Tahap ini akan melibatkan evaluasi teknis dan pilihan normatif. Tujuan tahap ini adalah untuk mempersempit pilihan-pilihan yang masuk akal dengan tidak memasukkan pilihan-pilihan yang tidak memungkinkan dan menggunakan pilihan-pilihan yang mungkin saja dapat diterapkan. Tahap ketiga terdiri atas pengambilan satu atau kombinasi solusi yang diterapkan hingga akhir tahap ini. ketiga tahap selanjutnya adalah tahap yang memberikan pilihan-pilihan, mengevaluasi hasil dan seluruh proses dan pemberhentian kebijakan untuk mendapatkan kesimpulan yang dicapai dari evaluasi tersebut. Menurut Ramesh dalam *Studying Public Policy* ada lima tahap siklus kebijakan, yaitu : (1) penyusunan agenda, (2) perumusan kebijakan, (3) pembuatan keputusan, (4) penerapan kebijakan, (5) evaluasi kebijakan

Sebagai pembanding Lester dan Steward Jr. dalam Nugroho(2009:674) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi dampak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/ atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Sedangkan James Anderson (Winarno,2012:168), membagi evaluasi kebijakan publik menjadi tiga, tipe pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Secara umum Dunn (Nugroho, 2009:671) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni :

- *Efektifitas* ; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
- *Efisiensi* ; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- *Kecukupan* ; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
- *Perataan* ; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
- *Responsivitas* ; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
- *Ketepatan* ; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, menurut Wibawa *et al* dalam Nugroho (2011 : 675-676), yaitu:

- a. **Eksplanasi**, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- b. **Kepatuhan**, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. **Audit**, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. **Akunting**, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Terdapat beberapa model dalam mengevaluasi suatu kebijakan / program, meskipun antara yang satu dengan lainnya berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek-objek yang dievaluasi, yang tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak

lanjut suatu program. Menurut Arikunto dan Jabar (2009 : 7), ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program, yaitu Stufflebeam, Mettfessel, Michael Scriven, Stake dan Glaser, membagi jenis-jenis model evaluasi, yaitu:

- a. *Goal Oriented Evaluation Model*, objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus, mencek sejauh mana tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Model ini dikembangkan oleh Tyler.
- b. *Goal Free Evaluation Model*, yang menjadi perhatian dalam evaluasi ini adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yaitu hal yang tidak diharapkan).
- c. *Formatif-Sumatif Evaluation Model*, Tujuan evaluasi formatif berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Model ini menunjukkan tentang apa, kapan dan tujuan evaluasi tersebut dilaksanakan.
- d. *Countenance Evaluation Model*, Model ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu: deskripsi dan pertimbangan serta membedakan adanya tiga tahap evaluasi program, yaitu: anteseden, transaksi, keluaran.
- e. *CSE-UCLA Evaluation Model*, Ciri dari model ini adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, oplementasi hasil dan dampak.
- f. *CIPP Evaluation Model*, Model evaluasi ini merupakan model evaluasi yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. CIPP merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu:
 1. *Context evaluation* (evaluasi terhadap konteks)
 2. *input evaluation* (evaluasi terhadap masukan)
 3. *process evaluation*(evaluasi terhadap proses)
 4. *product evaluation*(evaluasi terhadap hasil).Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sistem.
- g. *Discrepancy Model*, Model ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu.

Paparan mengenai evaluasi kebijakan pemerintah tersebut dapat diperoleh suatu analisa bahwa yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan pemerintah adalah suatu proses penilaian yang dilakukan untuk membandingkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu, dengan hasil atau manfaat yang diperoleh dari adanya kebijakan tersebut. Artinya, evaluasi kebijakan pemerintah berusaha untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara target atau rencana yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan realisasi kenyataan dilapangan. Sehingga diharapkan evaluasi kebijakan dapat menjadi landasan dalam melaksanakan tindakan selanjutnya. Dengan demikian kita mampu mengetahui kemunduran yang terjadi dan kemajuan yang telah dicapai.

Berdasarkan uraian teori sebagaimana tersebut diatas, maka untuk mengevaluasi kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan digunakan kriteria evaluasi kebijakan public sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2000 : 610), yaitu:

1. Efektifitas, hal ini terkait antara hubungan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
2. Efisiensi, merupakan kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil
3. Kecukupan (*adequacy*), seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah
4. Perataan, dalam kebijakan publik mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh dari sasaran kebijakan publik
5. Responsivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan
6. Ketepatan, merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan

Ada 6 (enam) kriteria atau indikator evaluasi Dunn tersebut sangat sesuai digunakan untuk mengevaluasi kebijakan BOS, dimana kebijakan BOS ini termasuk jenis kebijakan distribusi yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk memberi fasilitas dan pelayanan bagi golongan penduduk tertentu.

Pertimbangan lain penggunaan Theory Dunn dalam evaluasi ini adalah, bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

4. Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan menurut Supriadi (2004: 3) memiliki cakupan luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Biaya langsung adalah segala bentuk pengeluaran yang secara langsung menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan.

Fattah (2002: 23) menyebutkan bahwa biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang

proses pendidikan akan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di Sekolah. Atau bisa berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Kategori yang kedua menurut Supriadi (2004: 4) adalah biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*). Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui Sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah yang kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial. Ketiga, biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non monetary cost*).

Pengelolaan biaya pendidikan ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu penyusunan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan (*accounting*) (Sukirman, dkk, 2008: 31). Fattah (2002: 47) memaparkan lebih lanjut mengenai anggaran atau budget sebagai rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian penyusunan anggaran dapat diartikan sebagai perundingan atau kesepakatan dalam menentukan besarnya alokasi biaya dalam suatu lembaga.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memenuhi kaidah orisinalitas dan menghindarkan terjadinya plagiasi, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini, adapun beberapa penelitian dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Muhammad Firyal Akbar tahun 2016 dengan judul Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (*Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara*). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan dari program pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara, dengan melihat atau mengukur evaluasinya menggunakan Kriteria evaluasi seperti efektifitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan Metode atau pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, adapun yang menjadi kasus dalam penelitian ini yaitu kasus yang menjadi rumusan masalah peneliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) langsung dilapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara Purposive, dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil evaluasi program pemberian dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa program ini sudah dijalankan dengan cukup baik dan

dapat dilanjutkan, namun begitu masih ada catatan yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam program ini sehingga diperlukan kajian ulang untuk keberhasilan dan kemaksimalan dari tujuan program dana BOS itu sendiri.

2. Penelitian Muhammad Wirawan, Bambang Satoso Haryono, Minto Hadi (2013) dengan judul “ Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang”.

Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi kebijakan berdasarkan indicator *output* dan *outcome* dan hasilnya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meringankan biaya masyarakat dalam menjalankan wajib belajar 9 tahun, agar tepat sasaran dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut. Kota Malang termasuk kota pendidikan yang juga melaksanakan program bantuan operasional sekolah. Dalam penggunaannya agar tidak terjadi kesalahan, maka sangat perlu ada evaluasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan dana BOS dari tingkat kota serta tingkat sekolah di SDN Percobaan 1 Kota Malang telah berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam juknis dan BOS, dan peran masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai masukan serta pengawasan akan program dana BOS.

3. Penelitian Lisran (2016) dengan judul “ Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOSDA Jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan baik dari aspek akuntabilitas prosedural, aspek akuntabilitas keuangan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana BOSDA dari 38 SMPN yang ada di Kabupaten Nunukan, terdapat 3 sekolah (SMPN 1 Kecamatan Lumbis, SMPN 1 Kecamatan Sei.Manggaris dan SMPN 1 Kecamatan Krayan Selatan) yang belum menunjukkan laporan pertanggungjawaban ke Dinas Pendidikan. Sedangkan 35 sekolah yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban belum memenuhi unsur akuntabilitas baik dari aspek akuntabilitas prosedural dan keuangan. Dari aspek prosedural salah satunya adalah terjadinya keterlambatan proses pencairan dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan, sedangkan dari prosedur penyampaian laporan pertanggungjawaban masih ada sekolah yang belum tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Melihat dari aspek keuangan, pengelolaan dana BOSDA yang dilakukan oleh sekolah-sekolah belum sesuai dengan petunjuk teknis.

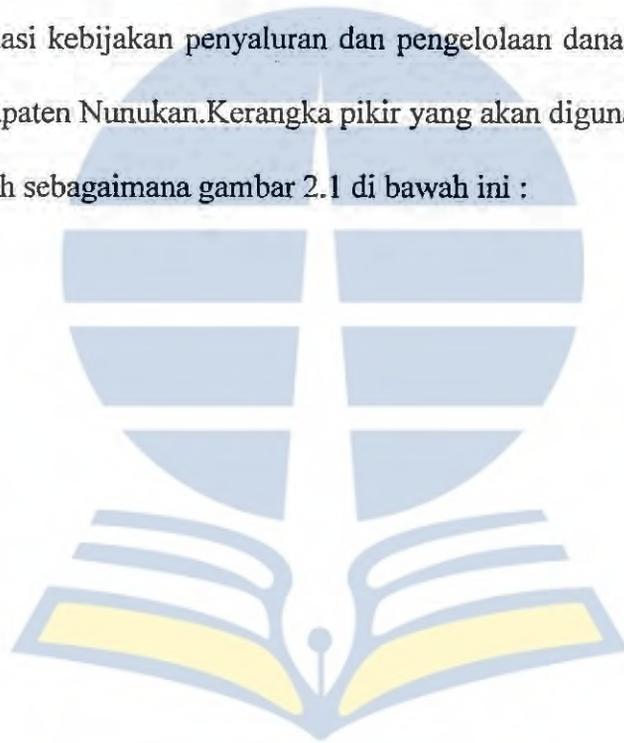
Ringkasan Perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan peneliti, yaitu sebagai berikut:

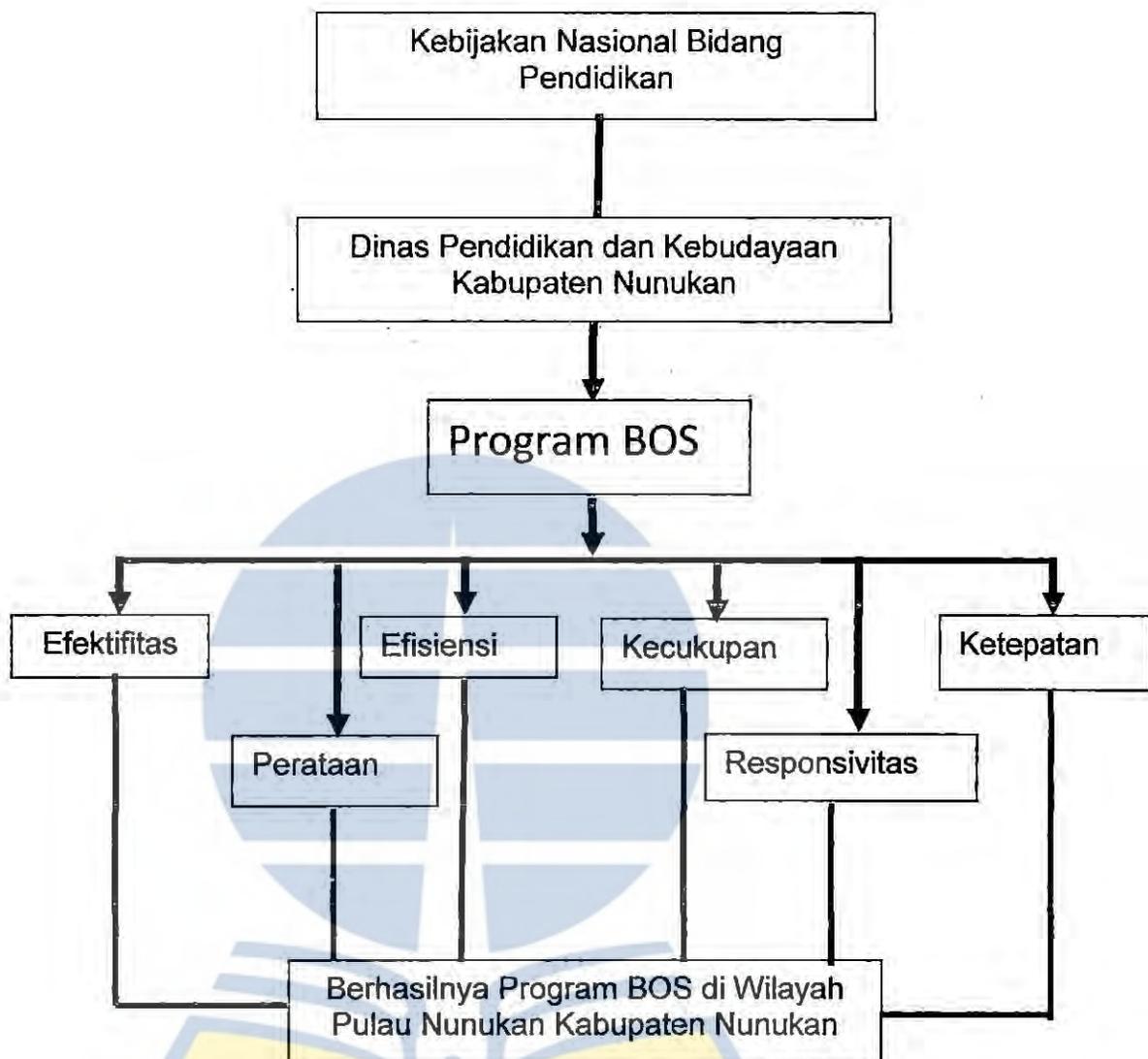
Tabel. 2.1. Ringkasan Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Firyal Akbar (2016)	Deskriptif Kualitatif	Evaluasi Kebijakan BOS pada Sekolah Dasar di Mamuju	- Fokus Penelitian Kebijakan BOS - Pendekatannya Deskriptif kualitatif	Indikator yang digunakan hanya 5 (tidak mengukur efektivitas) sementara penelitian ini menggunakan 6 indikator. Obyek Penelitian SD dan SMP
2.	Muhammad Wirawan, Bambang Satoso Haryono dan minto Hadi (2013)	Deskriptif Kualitatif	Evaluasi Kebijakan BOS pada Sekolah Dasar di Kota Malang	- Fokus Penelitian Kebijakan BOS - Pendekatannya Deskriptif kualitatif	Indikator yang digunakan : Indikator penelitian Wirawan dkk adalah output dan outcome sementara penelitian ini menggunakan indicator Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Obyek Penelitian SD dan SMP
3.	Lisran (2016)	Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas Pengelolaan BOSDA tingkat SMP	- Fokus Penelitian Kebijakan BOS - Pendekatannya Deskriptif kualitatif	Spek penelitian, Penelitian Lisran aspek yang diteliti akuntabilitas sementara penelitian ini aspek penelitiannya evaluasi kebijakan. Obyek Penelitian SMP

C. Kerangka Berpikir

Dalam rangka mendeskripsikan kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS, mengukur, menginterpretasikan dan memutuskan hasil yang telah dicapai oleh program, yaitu apakah telah dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat penyaluran dan pengelolaan dana BOS di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan, maka penulis memandang perlu melakukan evaluasi kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan. Kerangka pikir yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana gambar 2.1 di bawah ini :





Gambar 2.1. Kerangka Pikir Evaluasi Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOS (Sumber : Diadopsi dari Dunn (2000 : 610))

D. Operasional Konsep

1. Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), adalah keputusan yang di ambil pemerintah dengan pemberian bantuan operasional sekolah yang bertujuan membebaskan pungutan dan mengurangi beban operasional sekolah dengan sasaran SD dan SMP

2. Evaluasi Kebijakan penyaluran dan pengelolaan Dana BOS, adalah kegiatan menilai, mengukur dan menganalisis keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan apakah sudah mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sebelumnya dalam kebijakan dimaksud, dengan menggunakan kriteria : Efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, reponsivitas dan ketepatan.

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya kekeliruan atau interpretasi terhadap konsep yang digunakan, maka peneliti menggunakan konsep tentang Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Evaluasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu suatu proses atau rangkaian kegiatan dari kegiatan/program kerja yang telah dicapai dengan target yang direncanakan/ditetapkan, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tentang kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan yang mencakup proses kegiatan, pemerataan dan ketepatan.

1. Efektivitas, yaitu Berkenaan dengan apakah kebijakan Bantuan Operasional Sekolah tersebut mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Upaya tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: a. Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah

2. Efisiensi, yaitu Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Upaya tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: a. Usaha yang dilakukan sekolah agar program Bantuan Operasional Sekolah dapat mencapai tujuannya
3. Kecukupan. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Upaya tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: a. pencapaian hasil yang diinginkan b. Adanya alternatif kebijakan dalam menjalankan program dana Bantuan Operasional Sekolah
4. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Upaya tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: a. kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah memenuhi kebutuhan sekolah

5. Perataan, yaitu bantuan yang diberikan merata kepada seluruh siswa pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan serta terpenuhinya seluruh kebutuhan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan. Dengan indikator sebagai berikut: a. Bantuan yang merata.
6. Ketepatan, yaitu suatu hasil pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis. Dengan indikator sebagai berikut: a. Kesesuaian biaya dengan standar b. Kesesuaian Surat Pertanggung Jawaban dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan Dana BOS adalah keadaan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan BOS.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena tujuannya untuk memberi gambaran mengenai suatu variabel, gejala keadaan atau fenomena sosial tertentu. Guna menganalisis data yang diperoleh secara menyeluruh, agar dapat diketahui mengenai evaluasi kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana Bos di wilayah pulau Nunukan Kabupaten Nunukan.

Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2013 : 309).

Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis dan dibahas secara detail. Data yang berupa tabel-tabel dan angka-angka tersebut digunakan untuk mendukung analisis fenomena evaluasi kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS di wilayah pulau Nunukan Kabupaten Nunukan.

Pengumpulan data/informasi peneliti diperoleh dengan cara langsung mengambil data di lapangan dan mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS (Maleong, 2001). Data yang dihimpun

sesuai fokus penelitian berupa kata-kata, tindakan, situasi, dokumentasi dan peristiwa yang diobservasi. Instrumen yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Indepth interview*), sehingga peneliti akan mencatat serta menggunakan alat perekam dan mengamati perilaku orang yang diwawancarai.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan beserta satuan pendidikan tingkat SD dan SMP, dan waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan Agustus s/d Oktober 2017

C. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Menurut Lofland (Moleong, 2012:157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, pengambilan foto atau film.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan secara purposive yakni menunjuk langsung objek penelitian yang terdiri dari 1 SD dan 1 SMP. Penunjukan SD dan SMP tersebut didasarkan atas pertimbangan keterwakilan sekolah yang letaknya jauh dari kota dan sekolah yang di pusat kota.

Secara umum sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan sumber-sumber tidak tertulis atau data lapangan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan kunci (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, Kepala Sekolah) dan informan pendukung (Kabid Pembinaan SD dan SMP, Kasubag Keuangan, Kepala UPTD, Bendahara Sekolah, Komite Sekolah/ Orang tua peserta didik), melalui teknik sengaja sesuai tujuan penelitian (*purposive*) dan triangulasi kepada *stakeholder* dalam program pemberian dana BOS serta pihak-pihak yang mengetahui konteks penelitian.
2. Data sekunder, yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk dapat membangun sebuah abstraksi tentang tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan, sehingga sifat penyusunannya adalah dari kesimpulan umum ke khusus.

D. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini dimana dalam pelaksanaannya akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menempatkan peran peneliti sebagai instrument penelitian. Peneliti melakukan perencanaan penelitian, pengambilan data, pengolahan data dan penyusunan laporan penelitian. Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka peneliti akan membuat pedoman wawancara dan check list pengumpulan data serta menggunakan alat bantu lainnya seperti tape recorder dan alat tulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi/pengamatan langsung, wawancara dan studi dokumentasi hal ini sejalan dengan pendapat Chaterin Marshal dan Gretchen B Rosman dalam Sugiyono, (2013:309).

- a. Wawancaramendalam , dilakukan untuk memperoleh data yang akurat atau valid. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data kualitatif langsung pada narasumber (para informan) yang memiliki pengetahuan tentang penyaluran dan pengelolaan dana BOS yang sedang diamati di sekolah-sekolah di wilayah pulau Nunukan Kabupaten Nunukan. Sumber data diperoleh dari inrman utama dan informan pendukung.
- b. Pengamatan (Observasi), penelitian dilakukan dengan mengamati langsung obyek analisis. Hal ini dilakukan agar tidak ada informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara. Selain itu dilakukan pula pengumpulan data, dan mendeskripsikannya untuk mengetahui keberhasilan kebijakan program BOS.
- c. Studi Dokumentasi
Teknik olah data dokumen yang digunakan bertujuan untuk memperoleh data pelengkap berupa dokumen tertulis baik itu berupa buku-buku, artikel maupun jurnal, koran maupun majalah, foto-foto, peraturan perundang-undangan dan dokumen *on line* yang berhubungan dengan masalah - masalah penelitian dalam penelitian evaluasi program pemberian dana BOS di Kabupaten Nunukan.

F. Analisis Data

Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Sugiyono, 2011)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Reduksi data yaitu proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2. *Data Display* (Penyajian Data).

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi).

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Pendidikan di Nunukan

Berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemda Nunukan melaksanakan beberapa urusan pemerintahan, salah satu diantaranya adalah urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Disdikbud merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 5 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nunukan No 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan.

Disdikbud merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu kewenangan Disdikbud yaitu pembinaan penyelenggaraan pendidikan usia dini, Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar (SD dan SMP).

Saat ini kabupaten Nunukan memiliki 19 Kecamatan yang tersebar dalam 3 pulau yakni pulau besar Kalimantan, pulau nunukan dan

pulau Sebatik, 2 kecamatan diantaranya terletak di Pulau Nunukan, yakni Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.

Jumlah satuan pendidikan tingkat di Kabupaten Nunukan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 132 Sekolah dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 45 Sekolah. Adapun jumlah satuan pendidikan Khususnya tingkat SD dan SMP di Pulau Nunukan (Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan) sebagaimana tabel 2 di bawah ini :

Tabel 4.1. Jumlah SD dan SMP di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Satuan Pendidikan	
		SD/MI	SMP/MTS
1.	Nunukan	17	7
2.	Nunukan Selatan	7	5
	Jumlah	24	12

Sumber : Dindiknas Kab. Nunukan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwa satuan pendidikan di wilayah Pulau Nunukan sebanyak 24 SD/ MI dan 12 SMP/ MTS. Dari jumlah satuan pendidikan di Pulau Nunukan secara keseluruhan mendapatkan dana BOS yang. Adapun lokus pada penelitian ini pada SD Negeri 1 Nunukan Selatan yang beralamat di Jl. Waniwisata Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan dengan jumlah murid 414 orang, dan SMP Negeri 1 Nunukan yang beralamat di Jl. Iskandar Muda Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan dengan jumlah murid 770 orang.

2. Deskripsi BOS

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak asuransi, dll.

a. Tujuan BOS

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait Tujuan kebijakan BOS maka dilakukan penelaahan terhadap kebijakan BOS yang berupa Petunjuk Teknis BOS tahun 2017 dengan hasil sebagai berikut :

1) BOS Daerah (BOSDA)

Bos Daerah secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun, serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Secara khusus Program BOSDA bertujuan untuk :

- a) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasional sekolah

- b) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik miskin dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun swasta
- c) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta

2) BOS Pusat (BOS)

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Keberhasilan program BOS sangat dipengaruhi oleh faktor penyaluran dan pengelolaan dana dengan segala sumberdaya yang ada dalam program BOS. Penyaluran dan pengelolaan dana BOS yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS yang efektif dan efisien. Penyaluran dan pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi (Fitri, 2014).

Adapun tujuan Kebijakan BOS berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017, adalah :

- a) Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
- b) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau

- c) Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua / walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

b. Fungsi dan Tugas Manajemen BOS

1. Tim Bos Kabupaten

Tim Bos Kabupaten Terdiri dari :

- a) Pengarah : Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah
- b) Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- c) Manager : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d) Sekretaris : Jamaludim
- e) Anggota : Para Kepala Bidang, Seksi dan Staf yang membidangi

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim BOS Kabupaten meliputi: Melatih, membimbing input data pokok pendidikan, monitoring, verifikasi dan validasi kelengkapan data.

2. Tim Bos Sekolah

Tim BOS Sekolah terdiri dari

- a) Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
- b) Anggota :

* Bendahara : Bendahara Sekolah

* 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah

Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan;

* Penanggung jawab pendataan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim BOS Sekolah meliputi: Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan, verifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengandata peserta didik, menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, mematuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan, menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap, bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab, memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, serta memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah.

c. Cakupan Pengelolaan BOS

Program BOS juga memiliki tujuan khusus yaitu membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasi sekolah, sehingga membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program BOS meliputi semua satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di wilayah pulau Nunukan Kabupaten Nunukan yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Manajemen Kabupaten, dan Tim Manajemen Sekolah. Mekanisme selanjutnya menentukan jumlah alokasi dana, dimana pihak sekolah harus mengirimkan data jumlah siswa biasanya setelah Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

d. Dasar Hukum BOS

Dasar Hukum BOS adalah sebagai berikut :

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS adalah sebagai berikut :

a) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Salah satu tujuan kemerdekaan adalah :

“Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” ;

b) Pasal 28 B dan 28 C Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ;

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan ;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ;
 - g) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
 - h) Khusus untuk melaksanakan BOS di Kabupaten Nunukan, berupa Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/120/ U/ 2017 tentang Pembentukan Tim BOS Kabupaten Jenjang SD dan SMP Tahun Anggaran 2017.
- e. Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan BOS

Prosedur pertama diawali dengan penunjukkan kepada organisasi pelaksana, mulai dari tingkat teratas sampai tingkat terbawah. Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Manajemen Kabupaten dan Tim Manajemen Sekolah. Mekanisme selanjutnya menentukan jumlah alokasi dana, dimana pihak sekolah harus mengirimkan data jumlah siswa, biasanya setelah penerimaan siswa baru dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten.

Dalam proses pembuatannya harus detail dan terperinci, oleh karena itu dalam proses pembuatannya melibatkan seluruh pihak sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru, dan

Komite Sekolah. Seluruh data dikirimkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk dibuatkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan selanjutnya dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun mekanisme penyaluran dan pengelolaan BOS sebagai berikut :

1. Tahap Penetapan Alokasi

Pada Kegiatan penetapan alokasi BOS tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sekolah menggandakan (fotocopy) formulir data pokok pendidikan (BOS- 01A, BOS-01B dan BOS-01C) sesuai dengan kebutuhan. Biaya fotocopy formulir dapat dibebankan dari dana BOS;
- b) Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan;
- c) Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi;
- d) Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran data individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- e) Kepala sekolah menunjuk tenaga operator pendataan dengan menerbitkan surat tugas sebagai penanggung jawab di tingkat sekolah;

- f) Tenaga operator sekolah memasukkan data ke dalam aplikasi pendataan yang telah disiapkan oleh Kemdikbud kemudian mengirim ke server Kemdikbud secara online;
- g) Sekolah yang telah memiliki sarana yang memadai dan petugas/ pegawai sekolah yang telah dibiayai pemerintah, pemasukan data harus dilakukan di sekolah sebagai bagian pekerjaan rutin dan tanpa membebankan biaya tambahan pemasukan data dari dana BOS;
- h) Sekolah harus selalu mem-backup secara lokal data yang telah dientri;
- i) Formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik/pendidik/ tenaga kependidikan/sekolah harus disimpan di sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit;
- j) Melakukan update data secara regular ketika ada perubahan data, minimal satu kali dalam 1 semester;
- k) Data yang dikirim oleh sekolah akan dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah/pemerintah daerah untuk berbagai jenis program, misalnya alokasi BOS, tunjangan PTK, Bantuan Siswa Miskin, Rehab, dll;

2. Tahap Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari- Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-

Desember. Pada tahun anggaran 2017, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2017, yaitu Triwulan I (20 %) dan II (40 %) tahun anggaran 2017 tahun ajaran 2016/2017 dan Triwulan III (20 %) dan IV (20 %) tahun anggaran 2017 tahun ajaran 2017/2018.

Ketentuan tambahan terkait dengan pengelolaan dana BOS yang sering terjadi di daerah dan satuan pendidikan adalah sebagaiberikut:

- a) Jika terdapat peserta didik pindah/mutasi dari satuan pendidikan tertentu ke satuan pendidikan lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS peserta didik tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak satuan pendidikan lama. Revisi jumlah peserta didik pada satuan pendidikan yang ditinggalkan/menerima peserta didik pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
- b) Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke satuan pendidikan akibat kesalahan data pada triwulan 1 s/d triwulan 3, maka satuan pendidikan harus melaporkan kelebihan dana tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten. Tim Manajemen BOS Kabupaten melakukan pengurangan dana BOS di satuan pendidikan tersebut pada periode penyaluran berikutnya;

- c) Jika terjadi kelebihan salur pada triwulan 4 maka satuan pendidikan harus mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Dinas Pendidikan;
- d) Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke satuan pendidikan, maka satuan pendidikan harus melaporkan kekurangan dana tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten, dan selanjutnya akan dilakukan revisi terhadap alokasi penetapan dana BOS;
- e) Bilamana terdapat sisa dana di satuan pendidikan pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut dikembalikan ke Kas daerah;
- f) Penyaluran dana BOS ke satuan pendidikan tidak boleh melewati tahun anggaran berjalan.

3. Tahap Penggunaan Dana

Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

- a) Pengembangan perpustakaan
- b) Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
- c) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik
- d) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
- e) Pengelolaan Sekolah
- f) Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta manajemen Sekolah
- g) Lngganan Daya dan jasa

- h) Pembayaran Honorer
- i) Pembelian/ Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
- j) Biaya lainnya (Peralatan pendidikan yang mendukung, mesin ketik kantor).

4. Tahap Penggunaan Dana

Adapun pembukuan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut :

- a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
- b) Buku Kas Umum
- c) Buku Pembantu Kas
- d) Buku Pembantu Bank
- e) Buku Pembantu Pajak
- f) *Opname* Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas
- g) Bukti Pengeluaran

Selain dokumen tersebut di atas, pihak sekolah juga wajib membuat :

- a) Realisasi Penggunaan Dana tiap Sumber Dana
- b) Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS
- c) Pencatatan Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- d) Laporan Aset
- e) Laporan ke Dinas Pendidikan
Laporan *Online* ke Laman BOS

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun. Mulai tahun 2009, pemerintah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi BOS. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK), namun harus juga berkontribusi penting untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu, dengan biaya satuan BOS yang telah dinaikkan secara signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Perubahan kebijakan berkaitan dengan dana BOS antara lain mencakup perubahan biaya satuan BOS, kebijakan buku murah, perubahan penggunaan dana BOS dan struktur organisasi pelaksanaan BOS.

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil (*output*) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya satuan (*unit cost*) per siswa. Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah

pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu (1).Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran (2).Pengeluaran untuk tata usaha sekolah (3).Pemeliharaan sarana-prasarana sekolah (4).Kesejahteraan pegawai (5).Administrasi (6).Pembinaan teknis edukatif (7).Pendataan.

Sumber-sumber bantuan dana pendidikan antara lain meliputi : Anggaran rutin ; Anggaran pembangunan ; Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; pinjaman dan lain-lain yang dianggap sah termasuk diantaranya Dana BOS.

Berdasarkan hasil Observasi, studi dokumentasi, dan wawancara dengan sumber data dari informan utama (*key informan*) dan informan pendukung, berkaitan dengan kebijakan dana BOS untuk tingkat satuan pendidikan SD dan SMP diperoleh informasi sebagai berikut :

a. Kebijakan BOS

BOS merupakan program pendanaan dari pemerintah murni untuk mendanai biaya operasional sekolah. Prosedur pertama diawali dengan penunjukkan kepada Organisasi Pelaksana, mulai dari tingkat

teratas sampai tingkat terbawah. Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen Sekolah. Mekanisme selanjutnya menentukan jumlah alokasi dana, dimana pihak sekolah harus mengirimkan data jumlah siswa biasanya setelah PSB dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

Dalam proses pembuatannya harus detail dan terperinci, oleh karena itu dalam proses pembuatannya melibatkan seluruh pihak sekolah mulai dari: Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Seluruh data-data dikirimkan kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota untuk diaudit dan diteruskan ke tingkat atas. Proses pencairan dana dilaksanakan dalam 3 bulanan sekali setiap tahun dan diambil langsung oleh Bendahara Sekolah dengan persetujuan Kepala Sekolah dengan sepengetahuan Ketua Komite.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Kunci yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan sebagai Penanggung Jawab BOS sekaligus sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah, Kepala SMP, Kepala SD serta beberapa Informan Pendukung, dapat diketahui bahwa BOS sangat membantu sekolah dibidang keuangan guna membiayai belanja operasional sekolah dan membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik, pernyataan lengkap informan sebagai berikut :

- 1) Hasil wawancara dengan Informan Kunci, menyatakan sebagai berikut :

“Kebijakan BOS ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan akses pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, dengan adanya Bos dapat membantu biaya operasional sekolah dan membebaskan pungutan biaya operasional bagi peserta didik. Apalagi pada kondisi saat ini dimana daerah sedang mengalami defisit anggaran, dana BOS sangat dibutuhkan. BOS tidak diberikan secara langsung kepada siswa seperti pada bentuk pengalokasian dana Bantuan Khusus Siswa Miskin. BOS di salurkan melalui rekening sekolah yang kemudian dikelola oleh sekolah. BOS merupakan kebijakan lanjutan dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk bidang pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah pada era tahun 1998-2003. Jadi menurut saya kebijakan ini sangat baik tinggal bagaimana kita mengawal dan mengawasi dalam pelaksanaan sehingga tidak terjadi kebocoran, penyimpangan, atau penggunaan dana diluar peruntukannya”.

Selanjutnya Kepala Sekolah SD N 1 Nunukan Selatan mengungkapkan hal yang sama akan pentingnya BOS untuk biaya operasional sekolah, adapun petikan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Kebijakan BOS ini sangat membantu sekali untuk membiayai kegiatan operasional sekolah, seperti pembelian buku bahan ajar, pengadaan alat tulis dan peraga pembelajaran, pembayaran gaji guru dan tenaga administrasi, dll”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala SMP N 1 Nunukan :

“Dengan adanya BOS pungutan biaya sekolah untuk membiayai kegiatan operasional sekolah tidak dilakukan lagi di sekolah kami, semua biaya operasional dibebankan pada dana BOS:

- 2) Hasil wawancara dengan Informan Pendukung, menyatakan sebagai berikut :

“Dengan adanya BOS, kami selaku wali murid merasa sangat terbantu khususnya soal biaya anak sekolah, tinggal kita memikirkan beli baju seragam, ongkos taxi dan uang jajan anak, walaupun kadang-kadang masih ada pungutan untuk membiayai kegiatan tertentu yang tidak tercakup BOS itupun atas kesepakatan bersama, dan kami pikir masih wajarlah”
(Informan : Ketua Komite SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan yang hamper sama disampaikan oleh informan pendukung lainnya :

“Sebagai Ketua Komite Sekolah sekaligus sebagai orang tua peserta didik, sejak adanya BOS saya merasa tidak terbebani dengan biaya pendidikan anak karena sudah tidak ada pungutan lagi, saya melihat juga fasilitas belajar sudah lebih baik, buku-buku pelajaran sudah lengkap, anak-anak yang berhenti sekolah juga berkurang, walaupun ada saya yakin bukan karena biaya tetapi alasan lain”
(Informan : Ketua Komite SMP N 1 Nunukan).

“Sejak adanya BOS, perlengkapan yang dibutuhkan untuk pembelajaran tersedia dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Gaji teman-teman guru honorer dan tenaga administrasi juga lancar dibayar dan tidak pernah ngadat, setiap penerimaan peserta didik baru juga selalu penuh sesuai dengan kapasitas rombel yang disediakan”.
(Informan : Guru Kelas SMP N 1 Nunukan)

Petikan wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa BOS merupakan sebuah kebijakan publik yakni keputusan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan public dengan tujuan untuk membiayai operasional kegiatan sekolah dan membebaskan pungutan pada peserta didik demi tercapainya peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Berdasarkan pendapat informan sebagaimana tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa BOS merupakan sebuah Kebijakan Publik yang tepat dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya pihak sekolah, dewan guru dan peserta didik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Anderson (dalam Islamy, 2016 : 1.4) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu.

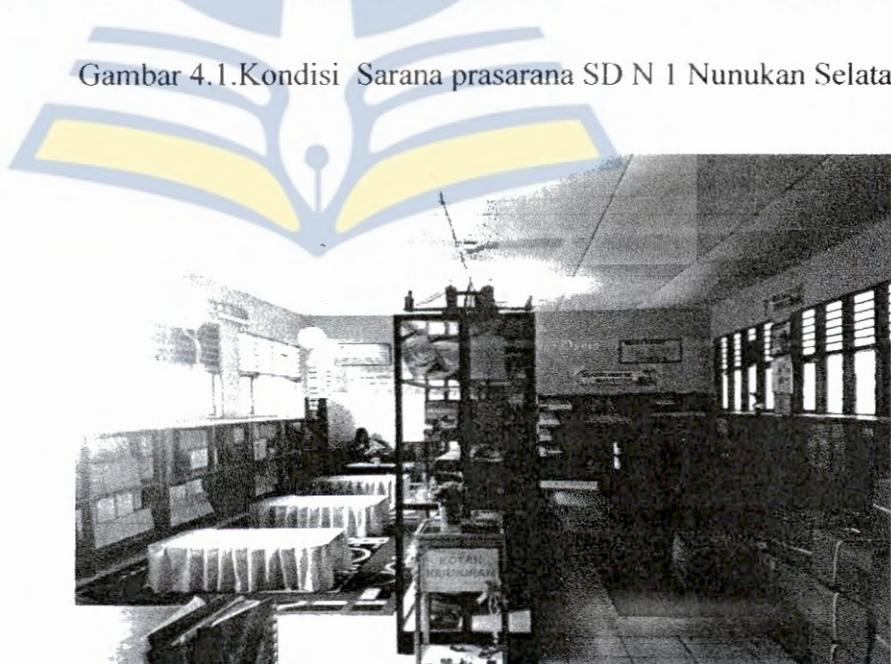
Sementara jika dihubungkan dengan pendapat Chiff J.O Udaji dalam Wahab (2012:5) yang mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai "*An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large*" (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat), maka BOS memenuhi kriteria yang disebutkan sehingga layak dikatakan sebagai kebijakan Publik. Dalam substansi Kebijakan BOS jelas mengandung sangsi jika ada penyimpangan, mengarah pada permasalahan pendanaan pendidikan, dan mempengaruhi masyarakat terkait dengan motivasi peserta didik dalam program pendidikan.

BOS sebagai sebuah kebijakan publik ini juga sejalan dengan pendapat Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy(1984:16) yang mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai "*a projected program of goals, values and practices*" (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah), Amara Raksasataya dalam Islamy juga mengemukakan bahwa "kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan".

Untuk menunjukkan perubahan yang terjadi di sekolah sejak adanya Kebijakan BOS, termasuk diantaranya perlengkapan sarana dan prasarana belajar-mengajar dan tidak adanya pungutan bagi para pelajar. Berikut ini gambaran kondisi sarana dan prasarana di sekolah setelah adanya BOS.



Gambar 4.1. Kondisi Sarana prasarana SD N 1 Nunukan Selatan



Gambar 4.2. Kondisi Sarana prasarana SMP N 1 Nunukan

Berdasarkan gambar 4.1 dan 4.2 yang diperoleh dari hasil observasi lapangan terlihat bahwa kondisi sarana dan prasarana sekolah terlihat baik dan cukup representatif, yaitu tersedianya ruang perpustakaan dan buku-buku pelajaran dengan jumlah koleksi buku yang banyak dan jenis judul buku juga beranekaragam, disamping itu tersedianya alat peraga sekolah dengan jenis dan jumlah yang cukup untuk membantu dalam proses pembelajaran.

Dengan memperhatikan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi sebagai tersebut di atas, menambah keyakinan peneliti bahwa BOS adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan kajian yang cukup dalam guna memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pembiayaan pendidikan dan mendukung tercapainya program pendidikan nasional, sehingga layak dikatakan bahwa BOS merupakan sebuah kebijakan publik.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Nugroho, 2011 : 627), implementasi meliputi suatu proses linier yang

terdiri dari 4 (empat) variabel yang menghubungkan antara kebijakan dan kerja variabel tersebut adalah: Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi ; karakteristik dari agen pelaksana/ implementor ; kondisi sosial, ekonomi dan politik ;dan kecenderungan (*disposition*) pelaksana/ implementor. Hubungan atau perubahan pada setiap variabel tersebut dapat mempengaruhi kinerja.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
- 3) Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Sumber : Elwan (2017 : 1)

Selanjutnya Elwan (2017 : 1) menjelaskan bahwa proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode;
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Terkait dengan kebijakan BOS, sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS 2007, maka tahapan pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1) Organisasi Pelaksana Bos Kabupaten dan Sekolah

Berdasarkan Pedoman Teknis BOS 2017, Organisasi pelaksana BOS di Kabupaten/Kota terdiri dari Tim Bos Kabupaten dan Tim Bos Sekolah. Penetapan Tim Bos merupakan kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

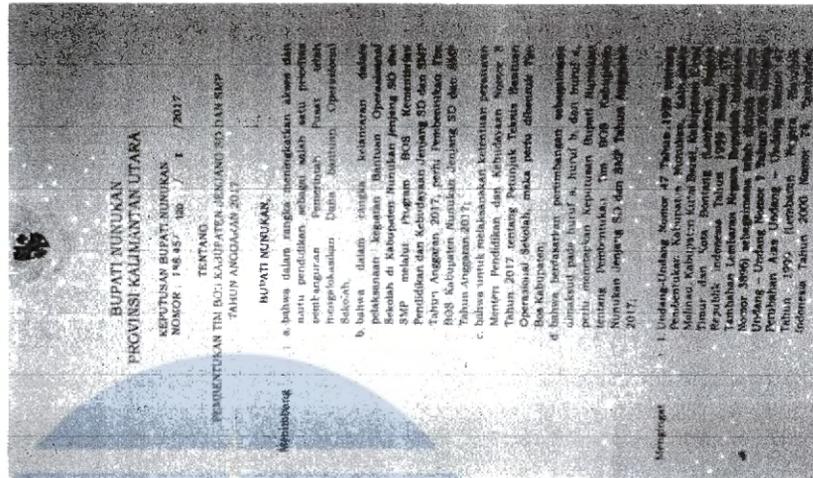
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan sebagai informan Kunci, diperoleh informasi sebagai berikut :

“Organisasi Pelaksana BOS Kabupaten Nunukan yang terdiri dari Tim Bos Kabupaten Nunukan dan Tim Bos Sekolah ditetapkan oleh Bupati setiap awal tahun anggaran yakni pada bulan Januari. Penetapan ini berupa Surat Keputusan Bupati yang didalamnya memuat struktur keanggotaan dan uraian tugas. Penentuan anggota yang tergabung dalam Tim disesuaikan dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS”.

(Informan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan)

Untuk mengkonfirmasi pernyataan informan, peneliti melakukan pengamatan langsung ke sekolah dan studi dokumentasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Tim Bos Kabupaten dan Tim Bos Sekolah sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/ 120/ I/ 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang

Pembentukan Tim Bos Kabupaten dan Tim Bos SD dan SMP Tahun 2017, berikut gambar 4.3 berupa dokumentasi SK Bupati :



Gambar 4.3 Dokumen Surat Keputusan Bupati Nunukan

Petikan hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa implementasi BOS pada tahap penetapan organisasi pelaksana BOS tingkat Kabupaten dan Sekolah sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Pedoman Teknis BOS.

2) Penetapan Alokasi Bos

Menurut Pedoman Teknis BOS 2017, alokasi ialah penentuan suatu anggaran dari program BOS. untuk keperluan pengajuan Dana BOS, diawali dengan sekolah melakukan pendataan jumlah siswa dan validasi data siswa untuk kemudian disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten. Adapun tahap kegiatan pendataan jumlah siswa dan validasi data siswa dana BOS(Lihat hal 55).

Secara garis besar tahap kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahapan yang dilakukan yaitu :Pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Penetapan Alokasi BOS tiap Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Penetapan Alokasi BOS tiap sekolah.

1) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai berikut :

“Proses penetapan alokasi Bos dimulai dari kegiatan pendataan, untuk mulai kegiatan pendataan ini telah dilakukan sosialisasi tentang tatacara pengisian formulir pendataan kepada para peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di semua sekolah di Kabupaten Nunukan. Kegiatan selanjutnya adalah rekonsiliasi data dengan Tim Bos Provinsi dan kabupaten juga telah dilakukan di awal tahun dan penetapan alokasi Bos Provinsi dan Kabupaten. Pada prinsip tahapan kegiatan dalam penetapan alokasi Bos di Kabupaten Nunukan telah dilakukan dengan baik” (Informan : Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan).

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh informan kunci lain, sebagai berikut :

“Sekolah kami sebagai salah satu sekolah yang menurut ketentuan Pedoman Teknis Bos memenuhi syarat memperoleh dana BOS setiap tahun, termasuk pada tahun ini 2017 mendapat alokasi dana BOS sesuai dengan banyaknya jumlah peserta didik, terkait proses/tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penetapan alokasi BOS, semua tahapannya telah dilaksanakan”

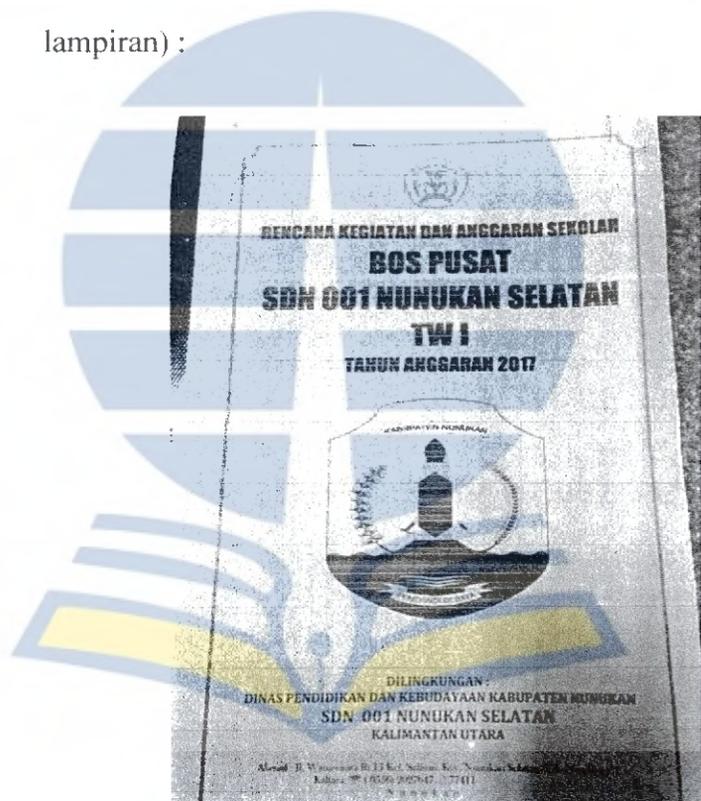
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Kami para guru telah mengikuti sosialisasi terkait BOS, kami juga terlibat langsung dalam pendataan serta pengisian formulir yang dibutuhkan sesuai petunjuk teknis, jelasnya seluruh tahapan sudah dilalui, buktinya riilnya untuk tahun ini dana BOS sudah cair, berarti sudah pasti alokasinya sudah ditetapkan”

(Informan : Guru SD N 1 Nunukan Selatan).

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses penetapan alokasi BOS sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis BOS. Untuk mengkonfirmasi atas pernyataan informan sebagaimana tersebut, penulis melakukan studi dokumentasi atas alokasi BOS sebagaimana gambar 4.4 Dan 4.5 di bawah ini (Dokumen lengkap dapat dilihat pada lampiran) :



Gambar 4.4 Dokumen Alokasi Anggaran BOS SD N 1 Nunukan Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017

Gambar 4.5 Dokumen Alokasi Anggaran BOS SMP N 1 Nunukan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen sebagaimana tersebut diatas terlihat bahwa proses penetapan alokasi Bos sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS, sehingga dapat dinyatakan bahwa implementasi BOS pada tahapan ini sudah terlaksana dengan baik.

3) Penyaluran Dana

Penggunaan anggaran dan keuangan dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan, adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan menurut Suryana (2008) sebagai berikut :

- Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
- Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.
- Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya.
- Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.

Terkait dengan penyaluran dana BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan, berikut petikan wawancara dengan informan :

- a) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai berikut :

“Penyaluran dana BOS ke rekening sekolah telah dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pedoman teknis BOS dengan besaran sesuai dengan alokasi masing-masing sekolah tanpa ada potongan / pungutan, kalau pun terjadi keterlambatan paling hanya beberapa hari, keterlambatan ini biasanya terjadi karena pejabat yang bertanda tangan sedang dinas luar atau system komputerisasi sasi sedang *error*”

(Informan : Ketua Tim Pelaksana BOS Kabupaten).

Pernyataan informan tersebut di atas dikuatkan pernyataan dari informan lainnya, sebagai berikut :

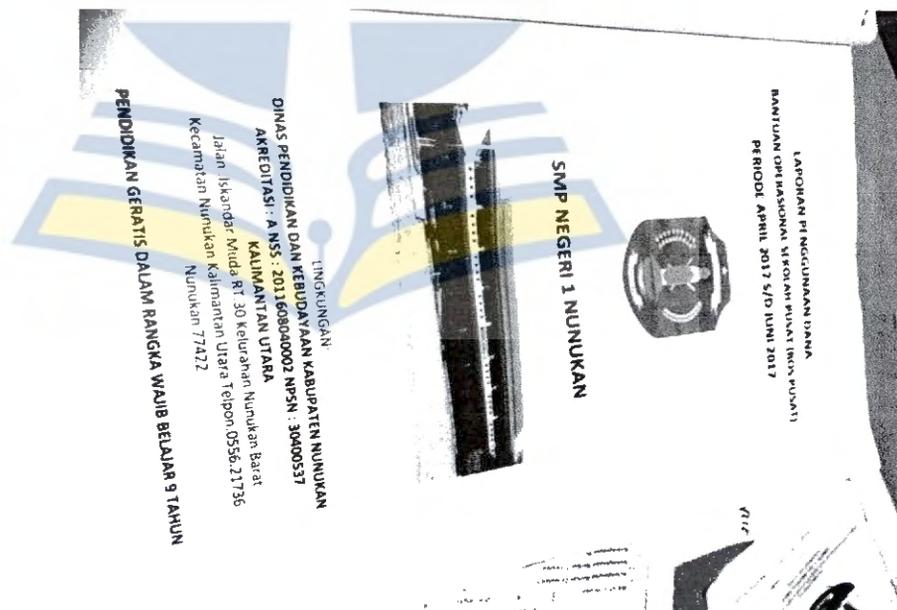
“Dana Bos masuk ke rekening sekolah kami sesuai dengan jadwal, tidak ada potongan dan pengurusan administrasi pencairannya juga tidak berbelit-belit... yah pokoknya mudahlah cairnya”

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan)

b) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Penyaluran dana BOS dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dalam Juknis BOS, yakni tahap I 20 %, tahap II 40 %, tahap III 20 % dan sudah diterima masing- masing sekolah, sementara untuk tahap IV sebesar 20 % untuk tahun 2017 belum disalurkan menunggu triwulan IV berjalan”
(Informan : Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan).

Untuk mengkonfirmasi pernyataan para informan, peneliti melakukan pengamatan langsung ke sekolah dan studi dokumentasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dana Triwulan I, II dan III sudah masuk ke rekening sekolah dan telah dibelanjakan sesuai peruntukannya, berikut gambar 4.6 berupa dokumentasi penyaluran anggaran :



Gambar 4.6 Dokumen Penyaluran Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen sebagaimana tersebut diatas terlihat bahwa Implementasi BOS pada tahap kegiatan penyaluran dana sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS 2017.

4) Penggunaan Dana

Kebijakan memberikan bantuan Dana BOS bagi lembaga Pendidikan dasar dan siswa di sekolah menengah dapat meningkatkan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan membebaskan iuran peserta didik untuk biaya operasional sekolah.

Sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS 2017, penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan, serta diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah.

Terkait dengan penyaluran dana BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan, berikut petikan wawancara dengan informan :

- a) Hasil wawancara dengan informan kuncimenyatakan sebagai berikut :

“Dana BOS di sekolah kami digunakan untuk pembayaran honorer, pembelian buku pelajaran, pembayaran listrik dan air, pelatihan guru serta membiayai kegiatan operasional sekolah seperti : penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran, ujian sekolah, dan operasional lainnya. Intinya dana BOS itu gunakan sesuai dengan pedoman”

(Informan : Kepala Sekolah SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan informan tersebut di atas dikuatkan pernyataan

dari Kepala SMP N 1 Nunukan, sebagai berikut :

“Menurut saya semua sekolah yang menerima BOS sama dalam menggunakan dananya karena sudah ada aturannya, kalau di sekolah kami dana BOS kami gunakan untuk pembayaran honorer, pengembangan perpustakaan, langganan listrik, telepon dan air, pelatihan guru serta membiayai kegiatan ekstra kurikuler, penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran, dan ujian sekolah”.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

b) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan RKAS yang telah dibuat, jika kegiatan tidak tercantum dalam RKAS maka tidak bisa dibayarkan. Sebagai bendahara saya bertugas mencairkan uang di bank dan membayarkannya kepada yang berhak, jika tidak sesuai dengan RKAS dan petunjuk teknis maka saya tidak akan membayar”.

(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Komite SMP 1

Nunukan, beliau menyatakan :

“Kami selalu mengingatkan kepada manajemen BOS sekolah agar dalam penggunaan dananya tidak menyimpang dari RKAS dan Petunjuk Teknis BOS 2017, hasilnya seperti yang kita lihatlah proses belajar mengajar berjalan baik, guru-guru honorer tidak ada yang tidak menerima gaji, buku-buku pelajaran lumayan lengkap, dll. Penggunaan BOS di SMP 1 ini sudah sesuai dengan peruntukannya, tidak ada yang berani macam-macam dalam penggunaannya karena pengawasannya ketat sekali”.

(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan).

Untuk mengkonfirmasi pernyataan para informan, peneliti melakukan pengamatan langsung ke sekolah dan studi dokumentasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sarana pembelajaran cukup lengkap termasuk buku-buku pelajaran dan alat tulis serta alat peraga cukup lengkap, berikut gambar 4.7 dan 4.8 berupa dokumentasi penggunaan dana :



Gambar 4.7 Sarana Perpustakaan SD N 1 Nunukan Selatan



Gambar 4.8 Sarana Perpustakaan SMP N 1 Nunukan

Dari gambar 4.7 dan 4.8 di atas terlihat bahwa ruang perpustakaan yang luas dilengkapi dengan perabot yang terbuat dari besi dan ber dinding kaca serta dilengkapi koleksi buku yang cukup banyak. Ruang perpustakaan, perabot dan buku-buku tersebut diadakan melalui anggaran BOS.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi BOS pada tahap kegiatan penggunaannya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS 2017.

5) Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan.

Terkait dengan Pertanggungjawaban dana BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan, berikut petikan wawancara dengan informan :

a) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai berikut :

“Sudah menjadi kewajiban kami untuk membuat pertanggungjawaban atas dana BOS yang diterima, pertanggungjawaban ini menjadi sebuah syarat pencairan dana BOS triwulan berikutnya. Pada prinsipnya semua bentuk pertanggungjawaban sudah kami buat sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis, kami menyadari pertanggungjawaban yang kami buat belum sepenuhnya

sesuai dengan standar karena SDM kami terbatas khususnya yang kompeten dibidang keuangan".
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara SMP N 1 Nunukan, sebagai berikut :

"Dalam rangka memenuhi kriteria akuntabilitas penggunaan dana BOS, kami berkewajiban membuat pertanggungjawaban berupa pencatatan dan pembukuan transaksi serta pelaporan realisasi fisik dan keuangan. Dengan keterbatasan sdm yang kompeten kami tetap berusaha untuk menyajikan dokumen administrasi keuangan dengan sebaik-baiknya"

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

b) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

"Sebagai bendahara saya yang paling banyak harus membuat pertanggungjawaban khususnya terkait dengan pembukuan, semua pembukuan yang diminta sebagaimana ketentuan pedoman teknis BOS sudah dibuat sesuai dengan kaidah pembukuan yang benar".

(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh informan pendukung lain, sebagai berikut :

"Sesuai dengan standar akuntansi maka setiap transaksi wajib kami catat dan bukukan, sebagai bendahara saya bertanggungjawab khususnya terkait dengan pembukuan, apabila pertanggungjawaban ini belum selesai maka akan menghambat pencairan dana BOS triwulan berikutnya"

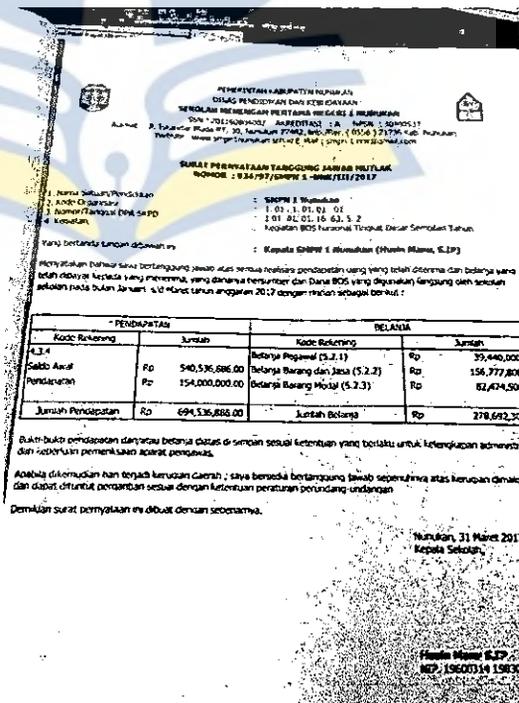
(Informan : Bendahara SMP N 1 Nunukan).

Untuk mengkonfirmasi pernyataan para informan, peneliti melakukan pengamatan langsung ke sekolah dan studi dokumentasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dana

BOS sudah lengkap, berikut gambar 4.9 dan 4.10 berupa dokumentasi pertanggungjawaban dana BOS :



Gambar 4.9. Surat Pertanggungjawaban Belanja BOS SDN 1 Nunukan Selatan



Gambar 4.10. Surat Pertanggungjawaban Belanja BOS SMP N 1 Nunukan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa pertanggungjawabandana BOS oleh pihak sekolah sudah dilaksanakan, meskipun belum sepenuhnya sempurna karena pihak sekolah mengalami sedikit kesulitan dalam pembuatan pertanggungjawaban mengingat belum tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten dibidang pengelolaan keuangan.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa Implementasi BOS pada tahap Pertanggungjawaban dan BOS sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS 2017.

2. Evaluasi Kebijakan BOS

Evaluasi kebijakan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) penting dilakukan karena untuk mengkoreksi penyelenggaraan Program BOS Kabupaten Nunukan dan sebagai bahan perbaikan bagi penyelenggaraan BOS berikutnya. Dengan hasil evaluasi maka pemerintah daerah bisa memperbaiki kinerja dan bisa mengambil keputusan yang baik untuk mendukung program penyelenggaraan dana BOS pada tahun-tahun berikutnya supaya bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Kebijakan pembangunan pendidikan kurun waktu saat ini diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih

besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar dengan cara membebaskan iuran peserta didik untuk biaya operasional sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai langkah nyata pemerintah dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar sekaligus sebagai upaya penuntasan target wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Untuk mengetahui sejauhmana kebijakan BOS dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dilakukan evaluasi kebijakan. Adapun hasil wawancara, observasi dan studi dokumen atas evaluasi kebijakan BOS di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan dengan menggunakan 6 (enam) indikator, sebagaimana berikut :

a. Efektifitas

Pada dasarnya untuk menentukan keberhasilan suatu program kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari kata efektivitas, karena efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas menurut Dunn (2000:610) yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa tindakan merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Bandung dalam rangka menciptakan pendidikan yang

berkualitas. Selain itu apabila setelah pelaksanaan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan masalah yang tengah dihadapi masyarakat maka dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan tersebut telah gagal.

Untuk menentukan berhasil dan tidaknya kebijakan dana BOS yang dilaksanakan pada dua sekolah sampel yang terletak di Pulau Nunukan sangat ditentukan oleh efektifitas kebijakan dana BOS di sekolah tersebut. Karena diketahui secara umum tujuan program dana BOS itu adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, sehingga diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dikarenakan masalah pembiayaan.

Untuk mengetahui sejauhmana Efektivitas BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan digunakan 2 indikator yaitu : **Sejauhmana kebijakan BOS membebaskan biaya pendidikan dan membantu operasional sekolah serta bagaimana realisasi RKAS.** Berikut petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator pertama:

- 1) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai berikut :

“Setelah adanya BOS, sekolah tidak mengalami kesulitan terkait dengan beban biaya operasional, diamping itu juga sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pembelajaran dapat tersedia baik jumlah maupun mutunya, para tenaga pendidik honorer juga terlihat lebih aktif karena jaminan mendapatkan honorinya jelas, dan yang lebih merasakan keuntungan dari BOS adalah para peserta didik

karena sudah tidak ada lagi pungutan alias sekolah gratis” (Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan

kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya BOS, tidak ada lagi pungutan biaya operasional bagi peserta didik hal ini sesuai dengan petunjuk teknis BOS, kegiatan belajar mengajar juga lebih efektif karena ditunjang dengan fasilitas pembelajaran yang memadai yang bersumber dari dana BOS, tidak ada lagi guru honor yang tidak dapat gaji, kegiatan ekstra kurikuler juga dapat diselenggarakan dengan baik” (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

- 2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Sebagai orang tua murid sangat berterima kasih dengan adanya BOS ini, orang tua tidak lagi berpikir bagaimana membayar biaya sekolah, kalupun ada tidak seberapa paling-paling hanya sekedar patungan membeli apa diluar biaya yang ditanggung BOS. (Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :

“Sebagai orang tua murid sangat bersyukur dengan adanya BOS ini, anak-anak bias fokus belajar tanpa beban berpikir terkait dengan biaya sekolah, beban kami sebagai orang tua juga sudah tidak terlalu berat soal biaya anak sekolah, saya melihat fasilitas sekolah juga lebih lengkap dibandingkan dulu-dulu. (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).

Dari petikan wawancara tersebut dapat terlihat bahwa Sekolah telah membebaskan peserta didik dari iuran biaya operasional sekolah, sarana pembelajaran juga telah dipenuhi dengan dana BOS, meskipun masih ada pungutan, namun pungutan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan selain yang ditetapkan dalam pedoman teknis

BOS, itupun atas kesepakatan bersama pihak sekolah, peserta didik dan orang tua.

Selanjutnya untuk menggambarkan sejauhmana Efektivitas BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan dilihat dari indikator kedua yaitu bagaimana realisasi RKAS, maka di bawah ini disajikan petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator kedua tersebut :

1) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai berikut :

“Realisasi Fisik dan keuangan berdasarkan RKAS BOS untuk 3 tahun terakhir ini cukup baik di atas 90%, untuk detailnya silahkan dilihat pada laporan realisasi fisik keuangan Th. 2015, 2016, dan 2017 per triwulan II”
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Untuk realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan RKAS BOS selaman 3 tahun terakhir ini sangat baik, kegiatan selesai semua, untuk lebih jelaskan nanti silahkan baca pada laporan yang kami buat setiap tahunnya”
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Dari setiap tahunnya serapan dana BOS berdasarkan RKAS di sekolah kami sudah sangat baik, karena BOS ini program utama nasional jadi mekanisme pencairannya pun tidak rumit”.
(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :

“Anggaran RKAS dana BOS di sekolah kami setiap tahunnya sudah terealisasi sangat baik sesuai rencana dan semua kegiatan juga sudah sesuai dengan RKAS”.

(Informan :Bendahara SMP N 1 Nunukan Selatan).

Dari petikan wawancara tersebut di atas diketahui bahwa pada kedua sekolah tersebut realisasi RAKS sudah baik, untuk mengkonfirmasi pernyataan informan, di bawah ini laporan realisasi RKAS Tahun 2015, 2016 dan 2017 per Triwulan III :

Tabel 4.2.
Realiasi RKAS Tahun 2015, 2016 dan 2017 per Triwulan III

No	Satuan Pendidikan	Th. 2015 (%)		Tahun 2016 (%)		Tahun 2017 (%)	
		Fisik	Keuangan (Ribuan)	Fisik	Keuangan (Ribuan)	Fisik	Keuangan (Ribuan)
1.	SD N 1 Nusa	100	310.000	100	330.400	55,48	202.240
2.	SMP N 1 Nunukan	100	797.750	100	784.750	60,00	461.800

Sumber : Laporan Fisik dan Keuangan Sekolah Tahun 2017

Tabel 4.2 tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi RKAS setiap tahunnya untuk kegiatan fisik dan keuangan mencapai 100 %, kecuali RKAS Tahun 2017 serapanannya belum mencapai 10 % disebabkan Tahun Anggaran belum berakhir, hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah efektif

Berdasarkan petikan wawancara, observasi dan dokumentasi terlihat bahwa tujuan pelaksanaan BOS sebagaimana tertuang dalam pedoman teknis sudah tercapai dengan baik. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Firyal Akbar tahun 2016 dengan judul Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara) yang menyatakan bahwa

berdasarkan Kriteria efektivitas program BOS di SD di Kabupaten Mamuju sudah tercapai dengan baik.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Dunn (2003:429) yang menyatakan bahwa Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Sementara efektivitas menurut Gedeian (1991:61) mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas)

Dengan demikian Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson yang dikutip Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dikaitkan dengan teori di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas BOS di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan telah tercapai secara optimal, sehingga selanjutnya peneliti berpendapat bahwa kebijakan

dana BOS dilihat dari kriteria efektivitas sudah efektif. Tingkat capaian efektivitas ini dikarenakan pihak sekolah dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS selalu bersandar kepada aturan yang telah ditetapkan yaitu Petunjuk Teknis (JUKNIS) penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga secara khusus tujuan dari program BOS itu sendiri dapat dirasakan manfaatnya oleh peserta didik khususnya siswa miskin. Yang mana pelaksanaan kebijakan dana BOS yaitu meringankan biaya pendidikan oleh siswa tercapai.

b. Efisiensi

Efisiensi seringkali kita gunakan ketika kita membahas suatu perencanaan dan sebuah program kerja, kedua kata tersebut sangat tepat digunakan sebagai konteks yang berorientasi pada tujuan atau hasil. Efisiensi melihat pada bagaimana cara untuk mencapai hasil itu dengan penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum.

Efisiensi dimaksudkan adalah suatu usaha yang kita lakukan mencapai hasil yang maksimal tanpa harus membuang banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan BOS. Karena dalam mengerjakan sesuatu hal selalu mempertimbangkan sumber daya yang digunakan, yakni bagaimana kita memanfaatkan tenaga, uang dan waktu yang sangat minimal demi pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil wawancara berkaitan dengan efisiensi BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan digunakan 2 indikator yaitu : Sejauhmana upaya sosialisasi yang dilakukan dan bagaimana proses pengawasan penyaluran dan pengelolaan BOS. Berikut petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator pertama:

- 1) Hasil wawancara dengan informankunci menyatakan sebagai berikut :

“Sosialisasi sudah kami selenggarakan melalui sebuah forum pertemuan yang dihadiri oleh beberapa pihak, diantaranya pihak manajemen sekolah, komite sekolah, perwakilan orang tua peserta didik, dan stakeholder lainnya. Sosialisasi ini diselenggarakan diseluruh jenjang pendidikan se Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis BOS, narasumber sosialisasi berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi”
(Informan : Kadindikbud Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Sesuai ketentuan pedoman teknis BOS, sosialisasi kami laksanakan baik melalui forum pertemuan maupun dengan pemasangan spanduk sekolah gratis, yang menjelaskan bahwa sekolah kami menyelenggarakan BOS sebagaimana kewajiban yang ada dalam Juknis, dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat melihat bahwa di sekolah ini sudah tidak dipungut biaya lagi jika ingin bersekolah, hal lain yang kami lakukan adalah anjongsana yakni mengunjungi para orang tua jika kami mengetahui ada anaknya yang sudah cukup umur untuk bersekolah namun belum bersekolah, dan kemudian kami memberikan pengertian dan mengajak anaknya untuk bersekolah”.
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh informan kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Jika sudah memasuki tahun ajaran baru kami sering mengedukasi dan mengajak para orang tua agar anaknya bersekolah di sekolah kami, ajakan ini biasa kami sampaikan lewat forum-forum informal seperti pertemuan pengajian, rapat RT, dan juga pada saat rapat dengan komite sekolah juga disampaikan agar meneruskan informasi kepada orang lain bahwa sekolah di tempat kami gratis tidak ada pungutan biaya sekolah”.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Sebagai ketua komite, saya beberapa kali pernah ikut sosialisasi BOS baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten maupun pihak sekolah, termasuk pada saat pengajian ada salah satu guru yang menyampaikan terkait program BOS”

(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :

“Sosialisasi BOS ini sangat inten dilakukan kalau menurut saya, pertama saya ikut sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, kemudian di sekolah juga saya lihat spanduk yang bertuliskan Sekolah Gratis tidak dipungut biaya, pada forum rapat RT juga disosialisasikan kebijakan BOS”

(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).

Dari petikan wawancara tersebut dapat terlihat bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Nunukan serta pihak sekolah sudah intensif menggunakan berbagai metode dan teknik sosialisasi, namun demikian masih banyak metode dan teknik yang berdampak luas yang belum digunakan seperti, penyebaran brosur/planfet, surat kabar, dan siaran radio.

Selanjutnya untuk menggambarkan sejauhmana efisiensi BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan dilihat dari indikator kedua yaitu bagaimana proses pengawasan penyaluran dan pengelolaan BOS, maka di bawah ini disajikan petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator kedua tersebut :

- 1) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai berikut :

“Pengawasan BOS dilakukan secara berlapis, mulai dari pengawanan internal oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat, kemudian pengawasan eksternal dari BKP dan BPK, serta pengawasan masyarakat oleh komite sekolah mapun masyarakat luas, dan khusus Tahun 2017 kita menggandeng Kejaksaan dalam hal pengawasan”
(Informan : Kadindikbud Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Penggunaan dan BOS ini diawasi oleh banyak intitusi/lembaga dan masyarakat luas, pokoknya berlapis-lapis, belum selesai satu lembaga melakukan pengawasan dan evaluasi datang lembaga lain dengan kepentingan yang sama”
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

- 2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Kami sebagai Komite Sekolah juga turut mengawasi penggunaan dana BOS, selain itu juga kami menjadi obyek pengawasan dari pengawas jika terjadi permasalahan dan penggunaan dan pengelolaan dana BOS” .
(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :

“Sebagai bendahara sekolah, kami yang paling sering diawasi, terkadang pengawasan inspektorat belum selesai datang BPK, pokoknya mumet Pak”.

(Informan : Bendahara SDN 1 Nunukan Selatan).

Petikan hasil wawancara berdasarkan 2 indikator efisiensi kebijakan BOS diketahui bahwa kegiatan sosialisasi dan pengawasan sudah dilaksanakan secara intensif dan melibatkan beberapa stakeholder terkait yang menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaannya. Hal tersebut sejalan dengan pengertian Efisiensi menurut (Dunn, 2003:609 dan 610) yang menyatakan bahwa “

“Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”.

Pengertian lain efisiensi disampaikan Hasibuan (1984;233-4) yang mengutip pernyataan H. Emerson yaitu :
“Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.” Selanjutnya menurut Mulyamah (1987;3) efisiensi adalah : “Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya”

Dengan uraian hasil dan pembahasan serta dikaitkan dengan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi pelaksanaan kebijakan dana BOS di sekolah sudah efisien jika dinilai dari segi pemanfaatannya bagi peserta didik karena dapat memenuhi segala kebutuhannya dalam kegiatan belajar di sekolah dan operasional sekolah itu sendiri. Tapi jika dinilai efisiensi pengelolaan di sekolah belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kebijakan dana BOS di sekolah yang juga diemban oleh guru sebagai tenaga pengajar sehingga dapat mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan kebijakan dana BOS tersebut, disamping itu juga karena beban tambahan yang dipikul tenaga pendidik akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003: 430).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Salah satu faktor yang sangat penting diketahui dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah program yang dilaksanakan adalah kecukupan.

Aspek ini sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan dari pada kebijakan, apabila aspek kecukupan terpenuhi dalam suatu program, maka secara otomatis kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan bisa dipastikan program tersebut akan berhasil meskipun terdapat kendala dalam program akan tetapi tetap menemukan solusi dalam penyelesaiannya, apabila sumber daya yang digunakan mendukung dalam operasionalisme program dan kebutuhan bagi penerima manfaat program terpenuhi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat Kecukupan BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan digunakan indikator Perbandingan penyediaan dan dengan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan. Berikut petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator pertama:

i) Hasil wawancara dengan informankunci menyatakan sebagai berikut :

“Kalau dilihat dari besaran nilai, memang dana yang kami terima cukup besar, dimana kami mendapatkan dana BOS 1,3 milyar lebih, namun dengan banyaknya program atau kegiatan sekolah seperti kegiatan pembelajaran, perlombaan, kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan ATK dan honorarium guru, dana tersebut hampir setiap tahunnya terpakai dan habis, tetapi dana yang sudah ada menurut saya belum mencukupi.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan

kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Tahun ini kami menerima dana BOS kurang lebih 364 juta, melihat dari pengalaman tahun sebelumnya dana itu selalu

habis dibelanjakan, tetapi masih banyak kegiatan sekolah yang belum tercover pembiayaan, oleh karena itu menurut saya besaran Dana BOS untuk selanjutnya dapat ditingkatkan disamping itu perlu perluasan penggunaan dana BOS dalam Juknis sehingga dapat digunakan untuk kegiatan fisik seperti rehab bangunan dan fasilitas pendukung lainnya, kalau berharap APBD, berat apalagi kondisi saat ini yang sedang terjadi badai defisit”.

(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).

2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan

sebagai berikut :

“Menurut saya, dan BOS yang diterima saat ini belum mencukupi kebutuhan operasional sekolah, sudah semestinya untuk tahun berikutnya harus ditingkatkan”

(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :

“Soal besaran dana sebenarnya cukup gak cukup ya harus dicukup-cukupin, namun demikian untuk menunjang pendidikan yang bermutu ya menurut saya dana BOS perlu penambahan”

(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).

Hasil wawancara menggambarkan bahwa dana BOS sangat bermanfaat dalam operasional sekolah tapi jumlah anggaran dana BOS yang diterima sekolah dalam membiayai operasional sekolah dirasakan belum cukup atau memenuhi. Padahal dana yang diterima oleh sekolah cukup besar karena jumlah siswa yang semakin banyak setiap tahunnya, sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut :

William N. Dunn (2003:430) menyebutkan beberapa variabel-variabel yang dapat dijadikan alat untuk melihat kecukupan kebijakan dengan menggabungkan macam-macam model evaluasi kebijakan

tersebut, salah satunya adalah kriteria kecukupan. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa besaran alokasi dana BOS masih dirasa kurang sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap efektivitas BOS, hal ini sejalan dengan pendapat Hakim (2015 : 4-5) bahwa kecukupan memiliki hubungan dengan efektivitas yang memprediksi jauh tidaknya alternatif kebijakan yang ada, dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firyal Akbar tahun 2016 dengan judul Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara) dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa besaran alokasi dana BOS belum mencukupi kebutuhan sekolah sehingga perlu penambahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dunn dalam Nugroho (2009 : 671) yang menyatakan bahwa ada 6 (enam) kriteria dalam melakukan evaluasi kebijakan, salah satunya kriteria kecukupan. Kecukupan menentukan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Ketepatan Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan (Winarno, 2008 : 186).

Terkait dengan hasil penelitian tersebut manajemen sekolah sudah selayaknya melakukan refocusing dan optimalisasi pengelolaan dana BOS serta control yang ketat terhadap penggunaan dana sehingga tidak terjadi penyimpangan atau pengeluaran anggaran diluar kebutuhan.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003: 434).

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Untuk mengetahui sejauhmana Tingkat Perataan BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan digunakan 2 indikator yaitu : Tingkat perlakuan terhadap pelajar dalam pelayanan pembelajaran dan kesempatan pelajar kurang mampu dalam memperoleh bantuan pendidikan. Berikut petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator pertama:

1) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai berikut

:

“Semua peserta didik kita layani dan fasilitasi dalam proses pembelajaran, tidak kita beda-bedakan, mau dia kaya, miskin, dsb tetap kita perlakukan sama”
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan

kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Dalam proses pemberian pelayanan pembelajaran di sekolah kami tidak pandang bulu, semua peserta didik mendapat akses pelayanan yang sama”.
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).

2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Menurut saya pelayanan pembelajaran di SD N 1 Nusa ini tidak membeda-bedakan antara anak orang kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa, semua sama”
(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :

“Tidak... menurut saya tidak ada perbedaan perlakuan di sekolah ini, semua pelajar diperlakukan sama dalam memperoleh pembelajaran”
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).

Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari aspek pelayanan pembelajaran tidak ada perlakuan yang berbeda diantara para peserta didik semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama.

Selanjutnya untuk menggambarkan sejauhmana Perataan BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan

SMP N 1 Nunukan dilihat dari indikator kedua yaitu kesempatan peserta didik kurang mampu dalam akses bantuan pendidikan, maka di bawah ini disajikan petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator kedua tersebut :

- 1) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai berikut :

“Setiap tahunnya kami menganggarkan bantuan siswa miskin kepada siswa yang didasarkan pada hasil pendataan sebelumnya, baik itu berupa bantuan dana maupun bantuan seragam dan alat tulis menulis, tetapi karena mengingat jumlah siswa miskin di sekolah kami tidak sedikit maka belum semua siswa miskin itu menerima bantuan, jadi kami berikan secara bertahap per tahun biasanya kami membelikan mereka baju seragam dan alat tulis menulis mereka saja.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan

kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Disekolah kami juga menyediakan bantuan pendidikan buat anak-anak kurang mampu, biasanya berupa dana atau dalam bentuk seragam sekolah atau alat tulis, karena jumlah terbatas biasanya kami bagi rata”

(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).

- 2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Perhatian terhadap pelajar kurang mampu disekolah ini sudah cukup baik, walau dengan dana terbatas tetapi masih mampu member bantuan berupa seragam dan alat tulis kepada pelajar kurang mampu”.

(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh

informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :

“Pelajar kurang mampu di sekolah ini juga mendapat bantuan berupa alat tulis dan baju seragam meskipun tidak setiap tahun, yang jelas ada perhatian lah”.

(Informan : Bendahara SMP N 1 Nunukann).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dilihat bahwa pemerataan penyaluran dana BOS baik dari kriteria pelayanan pembelajaran maupun bantuan pendidikan siswa kurang mampu dapat dirasakan merata oleh semua siswa. Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firyal Akbar tahun 2016 dengan judul Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara) dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa pemerataan BOS sudah dapat dirasakan oleh seluruh pelajar. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Dunn dalam Nugroho (2009 : 671) yang menyatakan bahwa ada 6 (enam) kriteria dalam melakukan melakukan evaluasi kebijakan, salah satunya kriteria pemerataan. Pemerataan mempengaruhi efektivitas kebijakan.

Khusus terkait dengan bantuan bagi pelajar kurang mampu memang masing-masing mengalami permasalahan dengan jumlah anggaran yang tersedia, sehingga perlu ada upaya pihak manajemen sekolah dalam meningkatkan pos anggaran bantuan pelajar kurang mampu melalui usulan penambahan anggaran BOS maupun menggali dana dari pihak lain CSR ataupun dari masyarakat luas.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai respon dari suatu aktivitas terhadap sasaran atas penerapan suatu kebijakan. Aspek ini merupakan salah satu kriteria yang dinilai dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program yang dilaksanakan. Dimana responsivitas merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didambakan oleh masyarakat jika kebijakan yang diterapkan dapat merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga peneliti berpendapat bahwa responsivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya kepuasan yang dirasakan baik dari pihak pemberi layanan maupun bagi penerima layanan. Pelayanan yang dimaksud yaitu layanan dalam hal pendidikan.

Untuk mengetahui sejauhmana Tingkat Responsivitas BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan digunakan 2 indikator yaitu : Tingkat kepuasan masyarakat atas dana BOS dan dampak yang dirasakan atas adanya bos. Berikut petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator pertama:

Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Secara umum saya rasa kebijakan BOS sangat membantu para orang tua, karena orang tua sudah tidak harus memikirkan biaya yang harus mereka keluarkan dalam menyekolahkan anaknya, jadi saya rasa program ini sangat membantu, dan orang tua cukup puas dengan adanya program ini.

(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya kebijakan BOS para orang tua sudah merasa puas dan senang karena sudah terbantu soal pembiayaan sehingga dapat menyekolahkan anaknya, Zaman dulu kalau dulu orang tua yang banyak anaknya sangat kesusahan jika harus menyekolahkan semua anaknya karena masalah biaya, namun sekarang lebih ringan biaya yang harus ditanggung orang tua”

(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).

Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari aspek kepuasan masyarakat atas dana BOS, masyarakat merasa bahwa BOS sangat membantu orang tua peserta didik terkait dengan biaya pendidikan dan masyarakat sudah merasa puas dengan kebijakan BOS tersebut.

Selanjutnya untuk menggambarkan sejauhmana Responsivitas BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan dilihat dari indikator kedua yaitu dampak yang dirasakan atas adanya dana Bos, maka di bawah ini disajikan petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator kedua tersebut :

Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Sebagai guru honorer kami merasa bersyukur dengan BOS, honor kami lancar diterima setiap bulan, jadi kami bisa lebih konsentrasi untuk memberikan pembelajaran kepada pelajaran tidak berpikir lagi kalau bulan depan tidak gajian gemana harus mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup” .

(Informan : Guru Honorer SMP N 1 Nunukan).

Pendapat senada juga disampaikan oleh informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya BOS beban orang tua pelajar terkait biaya sekolah sudah tidak terlalu berat, sehingga uang yang seharusnya untuk biaya sekolah dapat digunakan untuk modal usaha”.

(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :

“Dana BOS berdampak positif bagi orang tua peserta didik, kami tidak terbebani lagi dengan biaya sekolah anak, saya melihat juga mutu pendidikannya juga lebih baik”.

(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan).

Hasil wawancara tersebut dikaitkan dengan konsep responsivitas (*responsiveness*) yakni berkenaan dengan seberapa suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 1999 : 610). Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Dwiyanto, (1995 : 9) yang mengatakan bahwa responsivitas ditujukan untuk menilai respon yang diberikan dalam mendukung kebijakan, pendapat tersebut juga oleh pendapat Widianati (2015 : 1) Responsivitas pelayanan publik merupakan bukti instansi pemerintah untuk mengenali kebutuhan pelanggan sesuai dengan harapan, tuntutan, dan aspirasi masyarakat.

Bertolak dari hasil dan pembahasan tersebut di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa aspek responsivitas telah terpenuhi dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan pemerintah sangat merespon secara positif kebijakan pengelolaan dana BOS di sekolah dengan fungsinya sebagai pengendali kebijakan yang dilakukan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Manfaat kebijakan dana BOS ini pun dirasakan oleh orang

tua siswa dengan mendukung dan tetap memantau jalannya pengelolaan kebijakan di sekolah.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut (Dunn, 2003:499).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Ketepatan BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan digunakan 2 indikator yaitu : Peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan jumlah siswa-siswi putus sekolah. Berikut petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator pertama:

1) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai berikut :

“Alkhamdulillah... sejak adanya BOS, animo orang tua dalam menyekolahkan anak sangat besar, hal ini tampak pada saat penerimaan peserta didik baru sekolah kami selalu dibanjiri calon pelajar yang mendaftar berbeda dengan sebelum adanya BOS”

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Sejak adanya BOS, rombel sekolah kami siapkan untuk peserta didik baru selalu penuh bahkan banyak yang tidak tertampung sehingga harus menambah ruang baru”.
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).

2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Saya melihat partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anak semakin besar sejak adanya BOS, dilingkungan kami tinggal saya perhatikan tidak ada sudah anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah”
(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :

“Kalau dulu saya perhatikan setiap ruang kelas ada saja bangku sekolah yang kosong, tetapi sejak ada BOS, hamper semua ruang terisi penuh pelajar, ini artinya angka partisipasi sekolahnya meningkat”
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).

Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari aspek angka partisipasi sekolah meningkat sejak adanya BOS, untuk mengkonfirmasi hasil wawancara tersebut di atas, data Angka Partisipasi Sekolah menurut BPS Tahun 2016 dapat dilihat pada table 4.3. di bawah ini :

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD dan SMP di Kabupaten Nunukan Tahun 2016

No.	Jenjang Pendidikan	APM dan APK	
		APM	APK
1.	SD	90,55	102,61
2.	SMP	75,86	99,08

Sumber : Susenas 2016 BPS Kabupaten Nunukan

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut diatas diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar sekolah di Kabupaten Nunukan untuk SD (102,61%) dan SMP (99,08 %), angka ini menunjukkan bahwa jumlah peserta didik (usia sekolah dan orang dewasa) sudah sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah saat ini untuk jenjang SD dan SMP, namun berdasarkan Angka Partisipasi Murni jumlah peserta didik usia sekolah baru mencapai 90,55% untuk tingkat SD dan 75,86% untuk tingkat SMP, menunjukkan bahwa belum semua penduduk usia sekolah mengenyam bangku pendidikan tingkat SD dan SMP.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi sekolah meningkat sejak adanya BOS, tetapi belum semua penduduk usia sekolah berpartisipasi dalam pendidikan jenjang SD dan SMP, hal ini mengindikasikan adanya permasalahan lain yang dihadapi masyarakat selain masalah biaya pendidikan. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan angka partisipasi murni sekolah belum maksimal.

Selanjutnya untuk menggambarkan sejauhmana Ketepatan BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan dilihat dari indikator kedua yaitu penurunan angka partisipasi sekolah, maka di bawah ini disajikan petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator kedua tersebut :

1) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai berikut :

“Di sekolah kami hampir tidak ada peserta didik yang berhenti sekolah gara-gara biaya pendidikan, walaupun ada yang berhenti sekolah biasanya disebabkan masalah lain, seperti sakit, atau kecelakaan karena pergaulan bebas sehingga mesti dikawinkan.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Kalau di sekolah kami yang putus sekolah karena biaya sekolah sudah tidak ada, walaupun ada itu karena alasan lain seperti sakit”

(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).

2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai berikut :

“Menurut saya, sudah tidak ada lagi anak-anak putus sekolah gara-gara gak punya biaya, sekolah kan gratis sudah, orang tua tinggal kasih uang jajan saja” .

(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :

“Sepengetahuan saya gak ada lagi anak-anak putus sekolah akibat tidak punya biaya, yang ada anak berhenti sekolah karena terpaksa dikawinkan”.

(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).

Dari hasil petikan wawancara tersebut diketahui bahwa hampir tidak ada peserta didik yang putus sekolah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator penurunan angka putus sekolah kebijakan BOS terpenuhi, sedikit berbeda dengan hasil wawancara di bawah ini disajikan angka putus sekolah berdasarkan data Disdikbud Nunukan :

Tabel 4.4.
Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP

No	Satuan Pendidikan	T.A. 2015/2016		T.A. 2016/2017	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	SD N 1 Nusa	0	0	3	2
2.	SMP N 1 Nunukan	0	0	1	2

Sumber :Dindikbud Nunukan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 5 tersebut di atas diketahui bahwa pada Tahun Ajaran 2015/2016 tidak ada anak putus sekolah pada tingkat satuan pendidikan SD dan SMP, sementara pada Tahun Ajaran 2016/2017 terdapat 5 orang (0,05 %) peserta didik yang putus sekolah pada SD N 1 Nunukan Selatan dan 3 orang (0,04 %) peserta didik pada jenjang SMP. Jumlah angka putus sekolah tergolong sangat kecil namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang serius, dari hasil penelurusan kami mendapatkan informasi bahwa penyebab putus sekolah tersebut bukan karena biaya pendidikan, tetapi masalah lain yang tidak bias diungkapkan.

Berdasarkan petikan data angka putus sekolah dan petikan wawancara terkait kriteria ketepatan dengan indikator peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah sebagaimana

tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa kebijakan BOS tepat bagi masyarakat khususnya terkait bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharno (1995 : 64), bahwa ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan gerak kepada sasaran atau target yang ditentukan. Ketepatan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Ketepatan sangat dipengaruhi oleh koordinasi, besaran target dan teknik. Sedangkan menurut Sajoto (1995 : 9) ketepatan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan-gerakan bebas terhadap suatu sasaran, ketepatan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Seseorang yang dimaksud dalam pernyataan tersebut dapat disejajarkan dengan kelompok atau organisasi.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Firyal Akbar tahun 2016 dengan judul *Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)* dengan hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan BOS sudah tepat bagi masyarakat.

Uraian tersebut diatas menggambarkan hasil evaluasi kebijakan BOS dilihat dari capaian tujuan kebijakan, sementara jika dilihat dari aspek teknis dan prosedural pelaksanaan kebijakan BOS masih terdapat beberapa permasalahan sebagaimana uraian pada latar belakang, diantaranya: Masih sering terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS ke beberapa Sekolah, masih terdapatnya saldo sisa dana yang belum

digunakan pada rekening bendahara dana BOS di sekolah yang mengindikasikan kurang kemampuan manajemen sekolah dalam mengelola dana BOS, realisasi penggunaannya tidak dibuat laporan rekapitulasi klasifikasi jenis belanja sehingga tidak dapat diidentifikasi realisasi per jenis belanja sesuai dengan jenis belanja pada laporan keuangan daerah, permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan, belanja dan asset yang bersumber dari dana hibah langsung ke sekolah (BOS) tidak dapat dikonsolidasikan pada laporan keuangan pemerintah daerah, dan belum tersedianya Petunjuk Teknis yang lebih operasional / Standard Operasional Prosedur (SOP) penatausahaan keuangan BOS.

Untuk mengkaji lebih dalam kenapa dan mengapa timbul permasalahan teknis dan prosedural pelaksanaan kebijakan BOS, maka dilakukan penggalan data dan informasi dari beberapa informan, observasi langsung dan studi dokumentasi, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Masih sering terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS ke beberapa Sekolah :

Pelaksanaan BOS di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan tidak mengalami keterlambatan penyaluran dana, namun di beberapa sekolah di Kabupaten masih ada yang mengalami keterlambatan, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Informan

Kunci :

“Penyaluran dana BOS ke sekolah sudah sesuai jadwal khususnya untuk SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan, memang ada beberapa sekolah yang mengalami keterlambatan hal ini disebabkan oleh keterlambatan penyerahan laporan realisasi keuangan triwulan sebelumnya

sehingga pencairan dana untuk triwulan berjalan menunggu laporan diserahkan”
(Informan : Kepala Disdikbud Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan lain, yang menyatakan bahwa :

“Masalah utama yang sering menyebabkan keterlambatan penyaluran dana disebabkan oleh terlambatnya penyerahan laporan oleh sekolah, keterlambatan penyerahan laporan ini disebabkan oleh kemampuan SDM manajemen BOS sekolah dalam administrasi keuangan yang masih kurang”
(Informan : Manajer BOS / Sekretaris Disdikbud Nunukan).

Dari hasil petikan wawancara tersebut diketahui bahwa keterlambatan penyerahan dan BOS di beberapa sekolah disebabkan oleh kemampuan SDM manajemen BOS sehingga perlu ada upaya meningkatkan kapasitasnya melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang intensif khususnya terkait dengan administrasi keuangan.

- b. Masih terdapatnya saldo sisa dana yang belum digunakan pada rekening bendahara dana BOS di sekolah

Untuk menganalisis kenapa bisa terjadi permasalahan ini maka dilakukan wawancara dengan beberapa informan, dengan hasil sebagai berikut ::

“Setiap akhir tahun anggaran kami melakukan pemeriksaan internal, memang masih terdapat beberapa sekolah yang saldo anggarannya pada akhir tahun masih ada dan belum digunakan, sebagian besar saldo anggaran berupa kelebihan pagu dalam penyusunan RKAS sehingga sisanya tidak bisa digunakan kecuali RKAS dirubah, selain itu juga terdapat sisa anggaran yang memang betul-betul kegiatan tidak dilaksanakan dengan alasan waktunya mepet, nilai satuannya tidak sesuai, dsb”
(Informan : Kepala Disdikbud Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan lain, yang menyatakan sebagai berikut :

“Di sekolah kami (SD N 1 Nunukan Selatan) untuk anggaran dana BOS 2016 hingga akhir tahun memang ada sisa anggaran dalam rekening sekolah, ada kegiatan yang hingga akhir tahun belum selesai sehingga tidak kami bayarkan, disamping itu juga karena penghematan beberapa item pekerjaan”
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan selatan).

“Untuk SMP N 1 Nunukan dana BOS 2016 hingga akhir tahun memang ada sisa anggaran dalam rekening sekolah, tetapi sisa anggaran tersebut hanya berupa kelebihan pagu anggaran (penghematan belanja)”
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

Dari hasil petikan wawancara tersebut diketahui bahwa masih masih terdapat beberapa sekolah yang belum mampu membelanjakan dananya, hal ini tampak dari saldo anggaran pada akhir tahun yang masih ada dan belum dibayarkan atau dibelanjakan. Permasalahan ini mengindikasikan kurang mampuan manajemen sekolah dalam mengelola dana BOS baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Jika pihak manajemen BOS mampu menggunakan dananya secara optimal maka dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan BOS, sehingga perlu ada upaya peningkatan kapasitas SDM manajemen BOS dengan pendidikan dan latihan serta pengawasan dan pengendalian yang intensif dari Disdiknas kabupaten.

- c. Laporan realisasi anggaran tidak mencantumkan klasifikasi jenis belanja

Untuk menganalisis kenapa bisa terjadi permasalahan ini maka dilakukan wawancara dengan beberapa informan, dengan hasil sebagai berikut ::

“Standar pelaporan anggaran BOS ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga ada perbedaan standard akuntansi dengan Pemda. Yang dijadikan acuan oleh majemen BOS adalah Juknis dari Kemendiknas, ketika dilakukan konsolidasi dengan sistem pelaporan keuangan daerah maka tidak sinkron”
(Informan : Kepala Disdikbud Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan lain, yang menyatakan sebagai berikut :

“Tidak dimaksukkan laporan realisasi BOS per klasifikasi belanja ini sudah sesuai Juknis BOS Pusat, namun demikian ketika dikonsolidasi dengan SIMDA Nunukan terjadi tidak sinkron karena SIMDA memuat realisasi anggaran sampai detail rincian belanja”
(Informan : Manajer BOS/ Sekretaris Disdikbud Nunukan).

Dari hasil petikan wawancara tersebut diketahui bahwa tidak dimuatnya laporan realisasi per rincian obyek belanja ini sesuai dengan JUKNIS BOS Pusat, sementara dalam SIMDA Nunukan dibutuhkan laporan realisasi sampai dengan rincian obyek belanja, hal ini yang menjadi temuan BPK sehingga direkomendasikan untuk dilakukan harmonisasi peraturan/pedoman penatausahaan keuangan.

Dibutuhkan sebuah kebijakan agar dasar hukum pencatuman klasifikasi obyek belanja pada laporan jelas serta meningkatkan ketaatan

dan kepatuhan manajemen BOS dalam penyusunan laporan realisasi anggaran BOS sesuai dengan rekomendasi BPK.

d. Belum tersedia JUKNIS penatausahaan keuangan BOS

Permasalahan ini berkaitan dengan permasalahan pada point c di atas, karena ketiadaan JUKNIS / SOP ini yang menyebabkan standar pelaporannya belum sesuai dengan SIMDA kabupaten, disamping itu menyebabkan kebingungan manajemen BOS dalam melaksanakan kegiatan karena JUKNIS BOS Pusat masih bersifat umum belum membahas standar/prosedur secara detail.

Dengan belum terdapatnya JUKNIS / SOP yang dijadikan sebagai operasional ini, antar manajemen BOS / antar sekolah dalam memahami ketentuan JUNKIS BOS Pusat ada perbedaan, sehingga perlu dan amat mendesak untuk dibuat JUKNIS / SOP sebagaimana dimaksud.

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan BOS

a) Faktor yang Mendukung

- 1) Hasil dari wawancara dengan informan kunci, menyatakan sebagai berikut :

“Menurut saya faktor yang sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan BOS diantaranya adalah : Komunikasi yang efektif antar stakeholder terkait dimana saat ini komunikasi semakin mudah tidak ada batasan waktu dan jarak dengan media komunikasi yang ada saat ini, komitmen dan kerjasama yang kuat pihak Manajemen sekolah juga menjadi pendukung keberhasilan BOS”
(Informan : Kadindikbud Nunukan)

Pernyataan senada juga disampaikan informan Kunci lainnya, sebagai berikut :

“Kalau saya mengamati faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah jiwa kerjasama yang dimiliki para guru dan staf administrasi sekolah serta substansi kebijakan BOS yang memang berpihak ke masyarakat dalam mengatasi masalah terkait biaya pendidikan”.

(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan)

2) Hasil dari wawancara dengan informan pendukung, menyatakan sebagai berikut :

“Kalau menurut saya, kerjasama menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan BOS, disamping itu juga kejelasan pedoman teknis BOS”

(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan)

Pernyataan yang hamper sama juga disampaikan informan pendukung lainnya, sebagai berikut :

“Menurut saya, faktor pendukung keberhasilan BOS yang paling utama adalah komitmen dari manajemen BOS, kalau komitmennya kuat insyaallah pelaksanaan BOS akan lancar, tidak ada penyimpangan”.

(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan)

Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut di atas diketahui yang menjadi faktor penghambat adalah kerjasama dan komitmen. Kerjasama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan (Bachtiar 2004 : 15), sementara komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup caracara mengembangkan tujuan atau

memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi (Soekidjan, 2009 :).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mendukung keberhasilan BOS di Sd N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan Selatan adalah : Komitmen yang kuat pihak manajemen sekolah, jiwa kerja sama dan substansi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b) Faktor yang Menghambat

1) Hasil dari wawancara dengan informan kunci, menyatakan sebagai berikut :

“Menurut saya faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan BOS di Nunukan diantaranya adalah :Keterbatasan sumberdaya manusia yang kompeten dibidang administrasi keuangan dan informasi teknologi, Sarana pendukung sekolah yang terbatas (komputer, jaringan internet, media penyebaran informasi), dan peran serta orang tua murid yang kurang aktif khususnya dalam perencanaan dan pengawasan”

(Informan : Kadindikbud Nunukan)

Pernyataan senada juga disampaikan informan Kunci

lainnya, sebagai berikut :

“Kalau saya mengamati faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan BOS adalah terbatasnya sarana sekolah dan terbatasnya guru dan tenaga administrasi yang menguasai administrasi keuangan dengan baik”.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan)

2) Hasil dari wawancara dengan informan, menyatakan sebagai berikut :

“Kalau menurut saya, peranserta orangtua peserta didik yang masih belum aktif menjadi faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan BOS, kami sebagai bagian dari Komite sekolah

sudah berusaha memberikan edukasi dan sosialisasi ke mereka, namun samapai saat ini peransertanya belum tampak”
(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan)

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan informan pendukung lainnya, sebagai berikut :

“Menurut saya, faktor pendukung penghambat keberhasilan BOS yang paling utama ketersediaan sarana sekolah dan SDM yang belum memadai dalam pengelolaan BOS, mestinya pengelola BOS di sekolah ditangani oleh orang professional selain guru sehingga tidak mengganggu aktivitas pembelajaran”.
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan)

Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menghambat keberhasilan BOS di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan Selatan adalah : Keterbatasan sumberdaya manusia sekolah yang kompeten dibidang administrasi keuangan dan Informasi Teknologi, keterbatasan sarana penunjang (komputer, internet, dan media penyebaran informasi), dan peranserta orang tua peserta didik yang kurang aktif.

Menurut Susilo (2002:3) ”sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”. ”Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan”, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulrich dalam (Mathis dan Jackson, 2002:4). Maka dari itu, Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya

manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan (Tambunan,2003:15).

Menurut Arikunto (1993 : 82) dalam bukunya Organisasi dan Administrasi " Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, efisien". Sarana sekolah meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Contoh: gedung sekolah, ruangan, meja, kursi, alat peraga dan lain-lain. Sedangkan prasarana sekolah merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar atau pendidikan di sekolah. Sebagai contoh: jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dikaitkan dengan pendapat di atas, maka sumberdaya manusia dan sarana prasarana menentukan keberhasilan pelaksanaan BOS.

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan BOS, maka hal yang mesti dilakukan adalah mengatasi dan mengeliminir faktor yang menghambat serta mempertahankan dan meningkatkan faktor pendukung sehingga kebijakan BOS dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan BOS sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kebijakan BOS

BOS merupakan sebuah kebijakan publik yakni keputusan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan publik dengan tujuan untuk membiayai operasional kegiatan sekolah dan membebaskan pungutan pada peserta didik demi tercapainya peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Ditinjau dari aspek implementasi kebijakan BOS di Pulau Nunukan (SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan), dapat disimpulkan bahwa implelementasi kebijakan BOS sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari seluruh tahapan kegiatan yang ditentukan dalam petunjuk teknis BOS sudah dilaksanakan, diantaranya : Penetapan Organisasi pelaksana, penetapan alokasi, penyaluran dana, penggunaan dana, dan pertanggung jawaban BOS.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan BOS secara prosedural masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya : Masih terjadi keterlambatan penyaluran BOS ke sekolah, masih terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, laporan realisasi anggaran belum mencantumkan rincian obyek belanja, dan belum adanya JUKNIS / SOP BOS.

2. Evaluasi Kebijakan BOS

Secara umum hasil evaluasi kebijakan BOS menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan BOS sudah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya dalam Petunjuk Teknis Bos yaitu Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasional sekolah serta membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik miskin dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun swasta.

Berdasarkan 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan, yaitu : Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, 5 (lima) kriteria diantaranya sudah baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan BOS, kecuali kriteria kecukupan yang dinilai bahwa besaran alokasi dana BOS per peserta didik belum mencukupi biaya operasional sekolah sehingga perlu peningkatan jumlah dana BOS per peserta didik.

Selanjutnya berdasarkan kriteria ketepatan didasarkan pada hasil wawancara dan data Angka Partisipasi Kasar Sekolah sudah memenuhi kriteria ketepatan, tetapi berdasarkan Angka Partisipasi Murni Sekolah menunjukkan belum semua anak usia sekolah di Nunukan yang mengikuti pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain selain biaya yang dihadapi masyarakat terkait dengan keikutsertaan dalam pendidikan. Untuk mengetahui faktor penyebabnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Dilihat dari aspek teknis dan prosedural pelaksanaan kebijakan BOS belum cukup baik, ini dilihat dari : Masih terjadi keterlambatan

penyaluran BOS ke sekolah, masih terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, laporan realisasi anggaran belum mencantumkan rincian obyek belanja, dan belum adanya JUKNIS / SOP BOS yang lebih operasional, permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : Kualitas SDM pelaksana BOS yang masih rendah, pengawasan dan pendampingan yang belum efektif, serta belum adanya kebijakan pemerintah daerah tentang sistem penatausahaan keuangan BOS.

3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan BOS

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan BOS diantaranya : Komitmen yang kuat dan Kerjasama antara staf guru yang mau saling membantu untuk melakukan proses dari perencanaan pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan proses pelaporan meliputi pengarsipan data keuangan, serta substansi kebijakan BOS itu sendiri yang dinilai berpihak kepada kebutuhan masyarakat akan solusi biaya pendidikan.

b. Faktor Penghambat

Kurangnya sumber daya aparatur yang memahami tentang administrasi keuangan dan informasi teknologi merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan program dana BOS, selain itu peran serta wali murid yang masih kurang juga menjadi kendala karena dengan keterlibatan walimurid juga membantu proses kelancaran dalam pelaporan sehingga kedepannya dana BOS bisa diarahkan tepat

sasaran, disamping itu keadaan fasilitas sekolah yang dirasakan belum memadai (komputer, jaringan internet, dan media penyebaran informasi) sehingga mempengaruhi implementasi BOS secara umum.

B. SARAN

1. Teoritis

Beberapa topik penelitian lanjutan yang bisa diangkat oleh para peneliti sebagai terkait kebijakan BOS adalah sebagai berikut :

- a. Disarankan bagi peneliti lain agar dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terkait dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (diluar BOS) Sekolah di Kabupaten Nunukan.
- b. Disarankan kepada Peneliti selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana dampak kebijakan BOS terhadap kualitas pendidikan, baik dampak positif dan negatif agar dapat melakukan penelitian dengan topik **Dampak BOS terhadap kualitas pendidikan**

2. Praktis

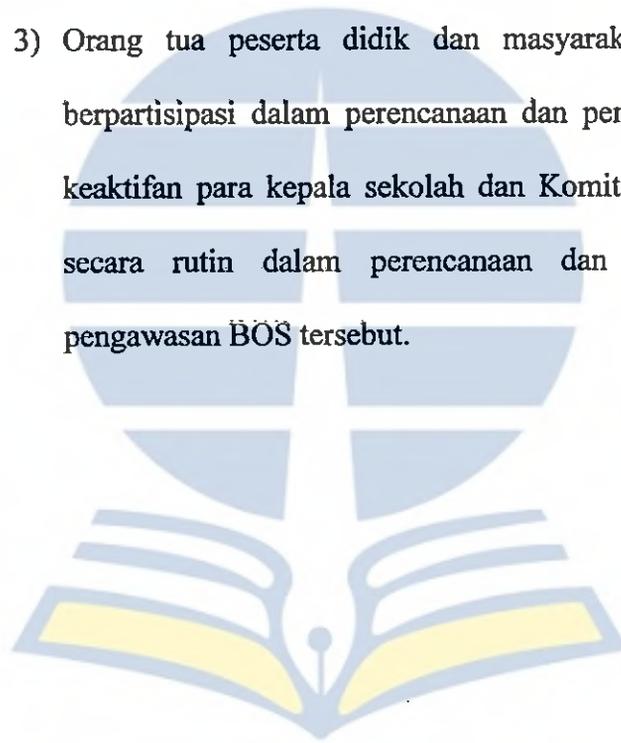
- a. Kebijakan BOS ditetapkan oleh pemerintah dengan kajian yang cukup dalam guna memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pembiayaan pendidikan dan mendukung tercapainya program pendidikan nasional, sehingga sangat layak dikatakan bahwa BOS merupakan sebuah kebijakan publik yang baik dan perlu diteruskan pelaksanaannya dengan sedikit revisi substansi kebijakannya. Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan perlu melakukan revisi atas pedoman teknis BOS terutama pada ketentuan cakupan penggunaan dana BOS agar dapat dipertukan, sehingga dana BOS dapat digunakan untuk membiayai kegiatan fisik sarana prasarana sekolah seperti rehab bangunan dan fasilitas penunjang lainnya, serta diharapkan besaran alokasi dana BOS per siswa dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah.

- b. Untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan prosedur pelaksanaan kebijakan BOS disarankan agar dilakukan peningkatan kualitas SDM pengelola BOS melalui kegiatan sosialisasi yang intensif, pendidikan dan pelatihan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan, perlu dilakukan pengawasan dan pendampingan yang efektif dengan melibatkan stakeholder lainnya, serta perlu ditetapkan kebijakan pemerintah daerah (Peraturan Bupati) tentang Standar Penatausahaan Keuangan BOS sebagai dasar penyusunan JUNKIS dan SOP.
- c. Untuk mengatasi kendala atau faktor penghambat pencapaian tujuan BOS disarankan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan perlu menyelenggarakan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola BOS yakni peningkatan kompetensi administrasi keuangan dan informasi teknologi atau mengusulkan penambahan pegawai dengan membuka formasi penerimaan pegawai kontrak dengan kompetensi sebagaimana dimaksud, disamping itu juga perlu pemenuhan fasilitas penunjang kegiatan di

setiap satuan pendidikan berupa pengadaan computer, jaringan internet dan media penyebaran informasi seperti Website Sekolah.

- 2) Manajemen BOS tingkat sekolah selalu menggunakan pedoman atau petunjuk teknis kegiatan BOS dalam pelaksanaan BOS, dengan cara membaca dan memahami mekanisme, prosedur dan ketentuan yang ada dalam JUKNIS dan selanjutnya menerapkannya dalam pelaksanaan kegiatan BOS.
- 3) Orang tua peserta didik dan masyarakat umum untuk aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan BOS, dengan keaktifan para kepala sekolah dan Komite Sekolah mengundang secara rutin dalam perencanaan dan melibatkannya dalam pengawasan BOS tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurokhman.2008. *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Universitas Negeri Yogyakarta Aksara
- Anderson, James E. 2006. *Public Policy Making*. Sixth Edition. Boston : Houghton Mifflin Company.
- Arikunto. (1993). *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____ dan Cepi, Safrudin, Abdul Jaba. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta
- _____. Jabar, C. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi
- _____. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT.Rineka Cipta. Jakarta
- Bachtiar, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Iteraksa, Batam
- Crawford, John. 2000. *Evaluation of Libraries and Information Services*, Ed. 2. London: Aslib, the association for information management and information management international
- Dimiyati dan Mudjiono. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : PT. Rieneka Cipta
- Dunn. William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edis Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- _____. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Fisipol UGM. Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum,
- Echols, John M dan Shadily, Hassan, 2000. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

- Ekowati, ML. 2005. *Perencanaan Implementasi dan Kebijakan atau Program*. Surakarta : Pustaka Cakra Solo.
- Fattah, Nanang. 2002. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Islamy, Irfan M, 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta
- _____, 2015. *Kebijakan Publik : Materi Pokok*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Jann, W and Wegrick K. 2007. *Theory of Policy Cycle dalam Hand Book of Public Policy Analysis, Theory, Politics, and Methods*. CRC Press Taylor and Francis Group.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Penerjemah Ricky Istamto. Jakarta, Rajawali
- Martoyo, Susilo. 2002. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Edisi Kedelapan. BPFE. Yogyakarta.
- Mathis, dan Jackson, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Salemba Empat
- Moleong, Lexy., J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyasa, E. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media Group, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Elex Komputindo
- _____. 2006. *Kebijakan untuk Negara-negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

- _____. 2011. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Media Elex Komputindo
- Sajoto. 1995. Pengembangan dan Pembinaan Kekuatan kondisi Fisik Dalam Olahraga. Jakarta: Dahara Prize.
- Siagian, Sondang. 1970. Filsafat Administrasi. Jakarta : Haji Masagung.
- Sidney. 2007. Perumusan Kebijakan Publik. Diterjemahkan oleh Atmijaya Jakarta : BNSP.
- Soekidjan. 2009. Manjaemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: BumiAksara
- Soleh Hartadi. 2007. *Kontribusi Kekuatan Otot Lengan dan Koordinasi Mata Tangan dengan Ketepatan Servis Atlet Bolavoli Yunion di Klub Bolavoli Yuso Yogyakarta*.
- Subarsono, (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Subarsono,AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sudjana, Djuju. 2006. Evaluasi Program Pendidikan (Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumberdaya Manusia). Bandung : Falah Produktion.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Alfabeta. Bandung
- Suharno, HP. 1993. Ilmu Kepelatihan Olahraga. Bandung. PT. Karya Ilmu.
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta : Sinar Grafika.
- Supriadi, Dedi. 2006. Satuan Biaya Pendidikan Dasar Menengah. Bandung : PT. Remaja Rosidakarya.
- Suryana, D. 2008. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta
- Tambunan, Tulus T.H. 2003. Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia, Beberapa Isu Penting. Jakarta : Ghalia Indonesia

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing, Malang

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

_____ 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Wirawan, 2012 ; *Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia, Teori Aplikasi dan Penelitian Salemba Empat*, Jakarta

Jurnal:

Widianati, Ika. 1995. *Responsivitas pelayanan publik dalam menangani keluhan pelanggan publik dalam menangani keluhan pelanggan di perusahaan daerah air minum (pdam) kabupaten Gresik*. *Jurnal mahasiswa unnesa* vol. 3 no. 5

Bajari, Abner Henry. 2014. *Konsep Kebijakan Publik dan Sosial Budaya dalam Penanggulangan Kemiskinan*. *Jurnal Ilmu Sosial* Volume 12 no. 1

Duta, Yudha Aria, 2013. *Tinjauan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah : Studi pada SMP Pawiyatan Surabaya*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 2 No. 12

Febryan, Zerry, dkk. 2016. *Evaluasi tentang Penataan Ruang dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat*. *eJournal Administrasi Reform*. Vol.4 No.2

Fitri, Afriliana. 2014. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi*. *Jurnal Administrasi Pendidikan* Volume 2 Nomor 1, *Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP*

Kaswandi. 2015. *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan*. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* Volume 3, Nomor 1

Wirawan, Bambang Satoso Haryono, Minto Hadi. 2013. *Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu*

Pendidikan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 13, No. 1, Universitas Brawijaya, Malang

Yahya, Ardi. 2013. *Kajian Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (bos) dan Sekolah Gratis (Kasus di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang)*. Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang *Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003*. Menteri Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Pemerintah RI

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 *Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 *Tentang Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013*

Sumber Internet:

Elwan, Muh. La Ode. 2017 *Proses Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. <https://education2351.wordpress.com/2017/02/07/proses-perumusan-implementasi-dan-evaluasi-kebijakan-publik/> : tanggal 15 Mei 2017

Hibrida, Anas Romzy. 2014. *Studi Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTS Darussalam Jember tahun 2013*. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61477/Anas%20Romzy%20Hibrida%20-%20070910201090.pdf?Sequence=1> diakses tanggal 27 April 2016

<http://bos.kemdikbud.go.id/media/share/upload/files/Juknis%20BOS%202015%20Final.pdf> diakses 8 April 2016p'

http://dindikpora.demakkab.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Permendikbud_Tahun2015_Nomor080.pdf diakses 12 Mei 2016

<http://lampung.kemenag.go.id/file/file/BidangMapenda/jbph1455499241.pdf> diakses tanggal 12 Mei 2016

<http://pendidikan-diy.go.id/file/bos/panduan.pdf> diakses 27 April 2016

Sastia, Hutasuhut. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri no. 125549 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Pematang Siantar*. http://eprints.ums.ac.id/27517/14/Naskah_Publikasi.pdf diakses tanggal 27 April 2016

Sinring, Bahar. 2009. *Pemanfaatan Dana BOS di SD/MI Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, Makassar*. <http://ejournal.Undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/4118/3243> diakses tanggal 27 April 2016

_____ (2004). *Alokasi Anggaran di Era Otonomi Daerah : Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. Laporan Lapangan 2004. Jakarta : Lembaga Penelitian Smeru.



Lampiran 1

PANDUAN WAWANCARA
(*Guide Interview*)

**Judul Penelitian : Evaluasi Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan
Dana BOS di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan**

I. KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	
A. Bagaimana Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ?	
B. Bagaimana Implementasi Kebijakan Operasional Sekolah ?	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kesiapan Organisasi Pelaksana BOS Kabupaten dan Sekolah ? 2. Bagaimana penetapan Alokasi BOS ? 3. Bagaimana penyaluran dana BOS ? 4. Bagaimana penggunaan da BOS ? 5. Bagaimana pertanggungjawaban BOS ?
II. EVALUASI KEBIJAKAN	
A.	Kriteria : Efektifitas (Capaian terhadap hasil yang diharapkan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauhmana pelaksanaan program bos mencapai tujuan untuk membebaskan biaya pendidikan dan membantu operasional sekolah ? 2. Bagaimana realisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ?
B.	Kriteria : Efisiensi (Seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana upaya sosialisasi yang dilakukan ? 2. Bagaimana proses pengawasanpenyaluran dan pengelolaan dana BOS ?
C.	Kriteria : Kecukupan (Seberapa jauh pencapaian hasil dalam pemecahan masalah)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perbandingan antara penyediaan dana dengan kebutuhan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan ?
D.	Kriteria : Perataan (Tingkat pemerataan pada kelompok yang berbeda)

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tingkat perlakuan terhadap pelajar dalam proses layanan pembelajaran ? 2. Sejauhmana kesempatan siswa-siswi yang kurang mampu dalam mendapatkan bantuan pendidikan ?
E.	Kriteria : Responsivitas (Tanggapan sejauhmana dapat terpenuhi kepuasan kebutuhan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat atas Dana BOS ? 2. Bagaimana dampak yang dirasakan atas adanya Dana BOS ?
F.	Kriteria : Ketepatan (Sejauhmana hasil yang dicapai mendatangkan manfaat)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peningkatan angka partisipasi sekolah ? 2. Bagaimana penurunan jumlah siswa-siswi putus sekolah ?
G.	Faktor penyebab permasalahan prosedural pelaksanaan BOS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terjadi keterlambatan penyaluran BOS ke sekolah, 2. Masih terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, 3. Laporan realisasi anggaran belum mencantumkan rincian obyek belanja, 4. Belum adanya JUKNIS / SOP BOS yang lebih operasional
III.	FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BOS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor apa saja yang menjadi pendukung pelaksanaan BOS ? 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan BOS ?

Lampiran 2: Matriks Hasil Wawancara dari Informan

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
A	KEBIJAKAN BOS		
1	Bagaimana Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ?	<p>Kebijakan BOS ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan akses pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, dengan adanya Bos dapat membantu biaya operasional sekolah dan membebaskan pungutan biaya operasional bagi peserta didik. Apalagi pada kondisi saat ini dimana daerah sedang mengalami defisit anggaran, dana BOS sangat dibutuhkan. BOS tidak diberikan secara langsung kepada siswa seperti pada bentuk pengalokasian dana Bantuan Khusus Siswa Miskin. BOS di salurkan melalui rekening sekolah yang kemudian dikelola oleh sekolah. BOS merupakan kebijakan lanjutan dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk bidang pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah pada era tahun 1998-2003. Jadi menurut saya kebijakan ini sangat baik tinggal bagaimana kita mengawal dan mengawasi dalam pelaksanaan sehingga tidak terjadi kebocoran, penyimpangan, atau penggunaan dana diluar peruntukannya (Informan : Kadindikbud Nunukan)</p> <p>Kebijakan BOS ini sangat membantu sekali untuk membiayai kegiatan operasional sekolah, seperti pembelian buku bahan ajar, pengadaan alat tulis dan peraga pembelajaran, pembayaran gaji guru dan tenaga administrasi, dll (Informan : Kepala SD N 1</p>	<p>Dengan adanya BOS, kami selaku wali murid merasa sangat terbantu khususnya soal biaya anak sekolah, tinggal kita memikirkan beli baju seragam, ongkos taxi dan uang jajan anak, walaupun kadang-kadang masih ada pungutan untuk membiayai kegiatan tertentu yang tidak tercakup BOS itupun atas kesepakatan bersama, dan kami pikir masih wajarlah (Informan : Ketua Komite SD N 1 Nunukan Selatan)</p> <p>Sebagai Ketua Komite Sekolah sekaligus sebagai orang tua peserta didik, sejak adanya BOS saya merasa tidak terbebani dengan biaya pendidikan anak karena sudah tidak ada pungutan lagi, saya melihat juga fasilitas belajar sudah lebih baik, buku-buku pelajaran sudah lengkap, anak-anak yang berhenti sekolah juga berkurang, walaupun ada saya yakin bukan karena biaya tetapi alasan lain. (Informan : Ketua Komite SMP N 1 Nunukan)</p> <p>Sejak adanya BOS, perlengkapan yang dibutuhkan untuk pembelajaran tersedia dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Gaji teman-teman guru honorer dan tenaga administrasi juga lancar dibayar dan tidak pernah ngadat, setiap penerimaan peserta didik baru juga selalu penuh sesuai dengan kapasitas rombel yang disediakan. (Informan : Guru Kelas SMP N 1 Nunukan)</p>

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
		<p>Nunukan Selatan)</p> <p>Dengan adanya BOS pungutan biaya sekolah untuk membiayai kegiatan operasional sekolah tidak dilakukan lagi di sekolah kami, semua biaya operasional dibebankan pada dana BOS (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan)</p>	
B	IMPLEMENTASI BOS		
1	Bagaimana kesiapan Organisasi Pelaksana BOS Kabupaten dan Sekolah ?	<p>Organisasi Pelaksana BOS Kabupaten Nunukan yang terdiri dari Tim Bos Kabupaten Nunukan dan Tim Bos Sekolah ditetapkan oleh Bupati setiap awal tahun anggaran yakni pada bulan Januari. Penetapan ini berupa Surat Keputusan Bupati yang didalamnya memuat struktur keanggotaan dan uraian tugas. Penentuan anggota yang tergabung dalam Tim disesuaikan dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS".</p> <p>(Informan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan)</p>	
2	Bagaimana penetapan Alokasi BOS ?	<p>Proses penetapan alokasi Bos dimulai dari kegiatan pendataan, untuk mulai kegiatan pendataan ini telah dilakukan sosialisasi tentang tatacara pengisian formulir pendataan kepada para peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di semua sekolah di Kabupaten Nunukan. Kegiatan selanjutnya adalah rekonsiliasi data dengan Tim Bos Provinsi dan kabupaten juga telah dilakukan di awal tahun dan</p>	<p>Kami para guru telah mengikuti sosialisasi terkait BOS, kami juga terlibat langsung dalam pendataan serta pengisian formulir yang dibutuhkan sesuai petunjuk teknis, jelasnya seluruh tahapan sudah dilalui, buktinya riilnya untuk tahun ini dana BOS sudah cair, berarti sudah pasti alokasinya sudah ditetapkan.</p> <p>(Informan : Guru SD N 1 Nunukan Selatan).</p>

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
		<p>penetapan alokasi Bos Provinsi dan Kabupaten. Pada prinsip tahapan kegiatan dalam penetapan alokasi Bos di Kabupaten Nunukan telah dilakukan dengan baik” (Informan : Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan).</p> <p>Sekolah kami sebagai salah satu sekolah yang menurut ketentuan Pedoman Teknis Bos memenuhi syarat memperoleh dana BOS setiap tahun, termasuk pada tahun ini 2017 mendapat alokasi dana BOS sesuai dengan banyaknya jumlah peserta didik, terkait proses/tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penetapan alokasi BOS, semua tahapannya telah dilaksanakan. (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).</p>	
3	Bagaimana penyaluran dana BOS ?	<p>Penyaluran dana BOS ke rekening sekolah telah dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pedoman teknis BOS dengan besaran sesuai dengan alokasi masing-masing sekolah tanpa ada potongan / pungutan, kalau pun terjadi keterlambatan paling hanya beberapa hari, keterlambatan ini biasanya terjadi karena pejabat yang bertanda tangan sedang dinas luar atau system komputerisasi sasi sedang <i>error</i>” (Informan : Ketua Tim Pelaksana BOS Kabupaten).</p> <p>Dana Bos masuk ke rekening sekolah kami sesuai dengan jadwal, tidak ada potongan dan pengurusan administrasi pencairannya juga tidak berbelit-</p>	<p>“Penyaluran dana BOS dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dalam Juknis BOS, yakni tahap I 20 %, tahap II 40 %, tahap III 20 % dan sudah diterima masing- masing sekolah, sementara untuk tahap IV. sebesar 20 % untuk tahun 2017 belum disalurkan menunggu triwulan IV berjalan” (Informan : Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan).</p>

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
		belit... yah pokoknya mudahlah cairnya" (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan)	
4	Bagaimana penggunaan dana BOS ?	<p>"Dana BOS di sekolah kami digunakan untuk pembayaran honorer, pembelian buku pelajaran, pembayaran listrik dan air, pelatihan guru serta membiayai kegiatan operasional sekolah seperti : penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran, ujian sekolah, dan operasional lainnya. Intinya dana BOS itu gunakan sesuai dengan pedoman" (Informan : Kepala Sekolah SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>"Menurut saya semua sekolah yang menerima BOS sama dalam menggunakan dananya karena sudah ada aturannya, kalau di sekolah kami dana BOS kami gunakan untuk pembayaran honorer, pengembangan perpustakaan, langganan listrik, telepon dan air, pelatihan guru serta membiayai kegiatan extra kurikuler, penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran, dan ujian sekolah". (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).</p>	<p>"Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan RKAS yang telah dibuat, jika kegiatan tidak tercantum dalam RKAS maka tidak bisa dibayarkan. Sebagai bendahara saya bertugas mencairkan uang di bank dan membayarkannya kepada yang berhak, jika tidak sesuai dengan RKAS dan petunjuk teknis maka saya tidak akan membayar". (Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>"Kami selalu mengingatkan kepada manajemen BOS sekolah agar dalam penggunaan dananya tidak menyimpang dari RKAS dan Petunjuk Teknis BOS 2017, hasilnya seperti yang kita lihatlah proses belajar mengajar berjalan baik, guru-guru honorer tidak ada yang tidak menerima gaji, buku-buku pelajaran lumayan lengkap, dll. Penggunaan BOS di SMP 1 ini sudah sesuai dengan peruntukannya, tidak ada yang berani macam-macam dalam penggunaannya karena pengawasannya ketat sekali". (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan).</p>
5	Bagaimana pertanggungjawaban BOS ?	<p>"Sudah menjadi kewajiban kami untuk membuat pertanggungjawaban atas dana BOS yang diterima, pertanggungjawaban ini menjadi sebuah syarat pencairan dana BOS triwulan berikutnya. Pada prinsipnya semua bentuk</p>	<p>"Sebagai bendahara saya yang paling banyak harus membuat pertanggungjawaban khususnya terkait dengan pembukuan, semua pembukuan yang diminta sebagaimana ketentuan pedoman teknis BOS sudah dibuat sesuai dengan kaidah pembukuan</p>

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
		<p>pertanggungjawaban sudah kami buat sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis, kami menyadari pertanggungjawaban yang kami buat belum sepenuhnya sesuai dengan standar karena SDM kami terbatas khususnya yang kompeten dibidang keuangan". (Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>"Dalam rangka memenuhi kriteria akuntabilitas penggunaan dana BOS, kami berkewajiban membuat pertanggungjawaban berupa pencatatan dan pembukuan transaksi serta pelaporan realisasi fisik dan keuangan. Dengan keterbatasan sdm yang kompeten kami tetap berusaha untuk menyajikan dokumen administrasi keuangan dengan sebaik-baiknya" (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).</p>	<p>yang benar". (Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>"Sesuai dengan standar akuntansi maka setiap transaksi wajib kami catat dan bukukan, sebagai bendahara saya bertanggungjawab khususnya terkait dengan pembukuan, apabila pertanggungjawaban ini belum selesai maka akan menghambat pencairan dana BOS triwulan berikutnya" (Informan : Bendahara SMP N 1 Nunukan)</p>
B	EVALUASI KEBIJAKAN		
1.	Kriteria Efektivitas		
a.	Sejauhmana pelaksanaan program bos mencapai tujuan untuk membebaskan biaya pendidikan dan membantu operasional sekolah ?	<p>"Setelah adanya BOS, sekolah tidak mengalami kesulitan terkait dengan beban biaya operasional, diamping itu juga sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pembelajaran dapat tersedia baik jumlah maupun mutunya, para tenaga pendidik honorer juga terlihat lebih aktif karena jaminan mendapatkan honorinya jelas, dan yang lebih merasakan keuntungan dari BOS adalah para peserta didik karena sudah tidak ada lagi pungutan alias sekolah gratis" (Informan : Kepala SD N 1</p>	<p>"Sebagai orang tua murid sangat berterima kasih dengan adanya BOS ini, orang tua tidak lagi berpikir bagaimana membayar biaya sekolah, kalupun ada tidak seberapa paling-paling hanya sekedar patungan membeli apa diluar biaya yang ditanggung BOS. (Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>"Sebagai orang tua murid sangat bersyukur dengan adanya BOS ini, anak-anak bias fokus belajar tanpa</p>

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
		<p>Nunukan Selatan).</p> <p>“Dengan adanya BOS, tidak ada lagi pungutan biaya operasional bagi peserta didik hal ini sesuai dengan petunjuk teknis BOS, kegiatan belajar mengajar juga lebih efektif karena ditunjang dengan fasilitas pembelajaran yang memadai yang bersumber dari dana BOS, tidak ada lagi guru honor yang tidak dapat gaji, kegiatan ekstra kurikuler juga dapat diselenggarakan dengan baik” (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).</p>	<p>beban berpikir terkait dengan biaya sekolah, beban kami sebagai orang tua juga sudah tidak terlalu berat soal biaya anak sekolah, saya melihat fasilitas sekolah juga lebih lengkap dibandingkan dulu-dulu. (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).</p>
b.	Bagaimana realisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ?	<p>“Realisasi Fisik dan keuangan berdasarkan RKAS BOS untuk 3 tahun terakhir ini cukup baik di atas 90%, untuk detailnya silahkan dilihat pada laporan realisasi fisik keuangan Th. 2015, 2016, dan 2017 per triwulan II” (Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>“Untuk realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan RKAS BOS selaman 3 tahun terakhir ini sangat baik, kegiatan selesai semua, untuk lebih jelaskan nanti silahkan baca pada laporan yang kami buat setiap tahunnya” (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).</p>	<p>“Dari setiap tahunnya serapan dana Bos berdasarkan RKAS di sekolah kami sudah sangat baik, karena BOS ini program utama nasional jadi mekanisme pencairannya pun tidak rumit”. (Informan :Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>“Anggaran RKAS dana Bos di sekolah kami setiap tahunnya sudah terealisasi sangat baik sesuai rencana dan semua kegiatan juga sudah sesuai dengan RKAS”. (Informan :Bendahara SMP N 1 Nunukan Selatan).</p>
2.	Kriteria Efisiensi		
a.	Sejauh mana upaya sosialisasi	“Sosialisasi sudah kami selenggarakan melalui	“Sebagai ketua komite, saya beberapa kali pernah ikut

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
	yang dillakukan ?	<p>sebuah forum pertemuan yang dihadiri oleh beberapa pihak, diantaranya pihak manajemen sekolah, komite sekolah, perwakilan orang tua peserta didik, dan stakeholder lainnya. Sosialisasi ini diselenggarakan diseluruh jenjang pendidikan se Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis BOS, narasumber sosialisasi berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi” (Informan : Kadindikbud Nunukan).</p> <p>“Sesuai ketentuan pedoman teknis BOS, sosialisasi kami laksanakan baik melalui forum pertemuan maupun dengan pemasangan spanduk sekolah gratis, yang menjelaskan bahwa sekolah kami menyelenggarakan BOS sebagaimana kewajiban yang ada dalam Juknis, dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat melihat bahwa di sekolah ini sudah tidak dipungut biaya lagi jika ingin bersekolah, hal lain yang kami lakukan adalah anjagsana yakni mengunjungi para orang tua jika kami mengetahui ada anaknya yang sudah cukup umur untuk bersekolah namun belum bersekolah, dan kemudian kami memberikan pengertian dan mengajak anaknya untuk bersekolah”. (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).</p>	<p>sosialiasi BOS baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten maupun pihak sekolah, termasuk pada saat penggajian ada salah satu guru yang menyampaikan terkait program BOS” (Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>“Sosialisasi BOS ini sangat inten dilakukan kalau menurut saya, pertama saya ikut sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, kemudian di sekolah juga saya lihat spanduk yang bertuliskan Sekolah Gratis tidak dipungut biaya, pada forum rapat RT juga disosialisasikan kebijakan BOS” (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).</p>
b.	Bagaimana proses pengawasan penyaluran dan pengelolaan dana BOS ?	<p>“Pengawasan BOS dilakukan secara berlapis, mulai dari pengawan internal oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat, kemudian pengawasan</p>	<p>“Kami sebagai Komite Sekolah juga turut mengawasi penggunaan dana BOS, selain itu juga kami menjadi obyek pengawasan dari pengawas jika terjadi</p>

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
		<p>ekternal dari BKP dan BPK, serta pengawasan masyarakat oleh komite sekolah maupun masyarakat luas, dan khusus Tahun 2017 kita menggandeng Kejaksaan dalam hal pengawasan” (Informan : Kadindikbud Nunukan).</p> <p>“Penggunaan dan BOS ini diawasi oleh banyak intitusi/lembaga dan masyarakat luas, pokoknya berlapis-lapis, belum selesai satu lembaga melakukan pengawasan dan evaluasi datang lembaga lain dengan kepentingan yang sama” (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).</p>	<p>permasalahan dan penggunaan dan pengelolaan dana BOS” . (Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>“Sebagai bendahara sekolah, kami yang paling sering diawasi, terkadang pengawasan inspektorat belum selesai datang BPK, pokoknya mumet Pak”. (Informan : Bendahara SDN 1 Nunukan Selatan).</p>
3.	Kriteria Kecukupan		
a.	Bagaimana perbandingan antara penyediaan dana dengan kebutuhan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan ?	<p>“Kalau dilihat dari besaran nilai, memang dana yang kami terima cukup besar, dimana kami mendapatkan dana BOS 1,3 milyar lebih, namun dengan banyaknya program atau kegiatan sekolah seperti kegiatan pembelajaran, perlombaan, kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan ATK dan honorarium guru, dana tersebut hampir setiap tahunnya terpakai dan habis, tetapi dana yang sudah ada menurut saya belum mencukupi. (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).</p> <p>“Tahun ini kami menerima dana BOS kurang lebih 364 juta, melihat dari pengalaman tahun sebelumnya dana itu selalu habis dibelanjakan, tetapi masih banyak kegiatan sekolah yang belum tercover pembiayaan, oleh karena itu menurut saya besaran Dana BOS untuk selanjutnya dapat</p>	<p>“Menurut saya, dan BOS yang diterima saat ini belum mencukupi kebutuhan operasional sekolah, sudah semestinya untuk tahun berikutnya harus ditingkatkan” (Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>“Soal besaran dana sebenarnya cukup gak cukup ya harus dicukup-cukupin, namun demikian untuk menunjang pendidikan yang bermutu ya menurut saya dana BOS perlu penambahan” (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).</p>

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
		ditingkatkan disamping itu perlu perluasan penggunaan dana BOS dalam Juknis sehingga dapat digunakan untuk kegiatan fisik seperti rehab bangunan dan fasilitas pendukung lainnya, kalau berharap APBD, berat apalagi kondisi saat ini yang sedang terjadi badai defisit". (Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).	
4.	Kriteria Perataan		
a.	Bagaimana tingkat perlakuan terhadap pelajar dalam proses layanan pembelajaran ?	<p>"Semua peserta didik kita layani dan fasilitasi dalam proses pembelajaran, tidak kita beda-bedakan, mau dia kaya, miskin, dsb tetap kita perlakukan sama" (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).</p> <p>"Dalam proses pemberian pelayanan pembelajaran di sekolah kami tidak pandang bulu, semua peserta didik mendapat akses pelayanan yang sama". (Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).</p>	<p>"Menurut saya pelayanan pembelajaran di SD N 1 Nusa ini tidak membeda-bedakan antara anak orang kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa, semua sama" (Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>"Tidak... menurut saya tidak ada perbedaan perlakuan di sekolah ini, semua pelajar diperlakukan sama dalam memperoleh pembelajaran" (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).</p>
b.	Sejauhmana kesempatan siswa-siswi yang kurang mampu dalam mendapatkan bantuan pendidikan ?	<p>"Setiap tahunnya kami menganggarkan bantuan siswa miskin kepada siswa yang didasarkan pada hasilpendataan sebelumnya, baik itu berupa bantuan dana maupun bantuan seragam dan alat tulis menulis, tetapi karena mengingat jumlah siswa miskin di sekolah kami tidak sedikit maka belum semua siswa miskin itu menerima bantuan, jadi kami berikan secara bertahap per tahun biasanya kami membelikan mereka baju seragam dan alat tulis menulis mereka saja. (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).</p>	<p>"Perhatian terhadap pelajar kurang mampu disekolah ini sudah cukup baik, walau dengan dana terbatas tetapi masih mampu member bantuan berupa seragam dan alat tulis kepada pelajar kurang mampu ". (Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>"Pelajar kurang mampu di sekolah ini juga mendapat bantuan berupa alat tulis dan baju seragam meskipun tidak setiap tahun, yang jelas ada perhatian lah". (Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).</p>

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
		<p>“Disekolah kami juga menyediakan bantuan pendidikan buat anak-anak kurang mampu, biasanya berupa dana atau dalam bentuk seragam sekolah atau alat tulis, karena jumlah terbatas biasanya kami bagi rata” (Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).</p>	
5.	Kriteria Responsivitas		
a.	Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat atas Dana BOS ?		<p>“Secara umum saya rasa kebijakan BOS sangat membantu para orang tua, karena orang tua sudah tidak harus memikirkan biaya yang harus mereka keluarkan dalam menyekolahkan anaknya, jadi saya rasa program ini sangat membantu, dan orang tua cukup puas dengan adanya program ini. (Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>“Dengan adanya kebijakan BOS para orang tua sudah merasa puas dan senang karena sudah terbantu soal pembiayaan sehingga dapat menyekolahkan anaknya, Zaman dulu kalau dulu orang tua yang banyak anaknya sangat kesusahan jika harus menyekolahkan semua anaknya karena masalah biaya, namun sekarang lebih ringan biaya yang harus ditanggung orang tua” (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).</p>
b.	Bagaimana dampak yang dirasakan atas adanya Dana BOS ?		<p>“Sebagai guru honorer kami merasa bersyukur dengan BOS, honor kami lancar diterima setiap bulan, jadi kami bisa lebih konsentrasi untuk memberikan pembelajaran kepada pelajaran tidak</p>

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
			<p>berpikir lagi kalau bulan depan tidak gajian gemana harus mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup” . (Informan :Guru Honorer SMP N 1 Nunukan).</p> <p>“Dengan adanya BOS beban orang tua pelajar terkait biaya sekolah sudah tidak terlalu berat, sehingga uang yang seharusnya untuk biaya sekolah dapat digunakan untuk modal usaha”. (Informan :Komite SD N 1 Nunukan Selatan).</p>
6.	Kriteria Ketepatan		
a.	Bagaimana peningkatan angka partisipasi sekolah ?	<p>“Alkhamdulillah... sejak adanya BOS, animo orang tua dalam menyekolahkan anak sangat besar, hal ini tampak pada saat penerimaan peserta didik baru sekolah kami selalu dibanjiri calon pelajar yang mendaftar berbeda dengan sebelum adanya BOS” (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).</p> <p>“Sejak adanya BOS, rombel sekolah kami siapkan untuk peserta didik baru selalu penuh bahkan banyak yang tidak tertampung sehingga harus menambah ruang baru”. (Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).</p>	<p>“Saya melihat partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anak semakin besar sejak adanya BOS, dilingkungan kami tinggal saya perhatikan tidak ada sudah anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah” (Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>“Kalau dulu saya perhatikan setiap ruang kelas ada saja bangku sekolah yang kosong, tetapi sejak ada BOS, hamper semua ruang terisi penuh pelajar, ini artinya angka partisipasi sekolahnya meningkat” (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).</p>
b.	Bagaimana penurunan jumlah siswa-siswi putus sekolah ?	<p>“Di sekolah kami hampir tidak ada peserta didik yang berhenti sekolah gara-gara biaya pendidikan, walaupun ada yang berhenti sekolah biasanya disebabkan masalah lain, seperti sakit, atau kecelakaan karena pergaulan bebas sehingga mesti dikawinkan.</p>	<p>“Menurut saya, sudah tidak ada lagi anak-anak putus sekolah gara-gara gak punya biaya, sekolah kan gratis sudah, orang tua tinggal kasih uang jajan saja” . (Informan :Komite SD N 1 Nunukan Selatan).</p> <p>“Sepengetahuan saya gak ada lagi anak-anak putus</p>

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
		<p>(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).</p> <p>“Kalau di sekolah kami yang putus sekolah karena biaya sekolah sudah tidak ada, walaupun ada itu karena alasan lain seperti sakit”</p> <p>(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).</p>	<p>sekolah akibat tidak punya biaya, yang ada anak berhenti sekolah karena terpaksa dikawinkan”.</p> <p>(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).</p>
C	PERMASALAHAN PROSEDURAL		
1	Masih sering terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS ke beberapa Sekolah	<p>“Penyaluran dana BOS ke sekolah sudah sesuai jadwal khususnya untuk SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan, memang ada beberapa sekolah yang mengalami keterlambatan hal ini disebabkan oleh keterlambatan penyerahan laporan realisasi keuangan triwulan sebelumnya sehingga pencairan dana untuk triwulan berjalan menunggu laporan diserahkan”</p> <p>(Informan : Kepala Disdikbud Nunukan)</p>	<p>“Masalah utama yang sering menyebabkan keterlambatan penyaluran dana disebabkan oleh terlambatnya penyerahan laporan oleh sekolah, keterlambatan penyerahan laporan ini disebabkan oleh kemampuan SDM manajemen BOS sekolah dalam administrasi keuangan yang masih kurang”</p> <p>(Informan : Manajer BOS / Sekretaris Disdikbud Nunukan).</p>
2	Masih terdapatnya saldo sisa dana yang belum digunakan pada rekening bendahara dana BOS di sekolah	<p>“Setiap akhir tahun anggaran kami melakukan pemeriksaan internal, memang masih terdapat beberapa sekolah yang saldo anggarannya pada akhir tahun masih ada dan belum digunakan, sebagian besar saldo anggaran berupa kelebihan pagu dalam penyusunan RKAS sehingga sisanya tidak bisa digunakan kecuali RKAS dirubah, selain itu juga terdapat sisa anggaran yang memang betul-betul kegiatan tidak dilaksanakan dengan alasan waktunya mepet, nilai satuannya tidak sesuai, dsb”</p> <p>(Informan : Kepala Disdikbud Nunukan).</p>	<p>“Di sekolah kami (SD N 1 Nunukan Selatan) untuk anggaran dana BOS 2016 hingga akhir tahun memang ada sisa anggaran dalam rekening sekolah, ada kegiatan yang hingga akhir tahun belum selesai sehingga tidak kami bayarkan, disamping itu juga karena penghematan beberapa item pekerjaan”</p> <p>(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan selatan).</p> <p>“Untuk SMP N 1 Nunukan dana BOS 2016 hingga akhir tahun memang ada sisa anggaran dalam rekening sekolah, tetapi sisa anggaran tersebut hanya berupa kelebihan pagu anggaran (penghematan belanja)”</p>

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
			(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).
3	Laporan realisasi anggaran tidak mencantumkan klasifikasi jenis belanja	<p>“Standar pelaporan anggaran BOS ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga ada perbedaan standard akuntansi dengan Pemda. Yang dijadikan acuan oleh majemen BOS adalah Juknis dari Kemendiknas, ketika dilakukan konsolidasi dengan sistem pelaporan keuangan daerah maka tidak sinkron”</p> <p>(Informan : Kepala Disdikbud Nunukan).</p>	<p>“Tidak dimaksudkan laporan realisasi BOS per klasifikasi belanja ini sudah sesuai Jukni BOS Pusat, namun demikian ketika dikonsolidasi dengan SIMDA Nunukan terjadi tidak sinkron karena SIMDA memuat realisasi anggaran sampai detail rincian belanja”</p> <p>(Informan : Manajer BOS/ Sekretaris Disdikbud Nunukan).</p>
D	FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENYELURAN DAN PENGELOLAAN BOS		
1	Faktor apa saja yang menjadi pendukung pelaksanaan BOS ?	<p>“Menurut saya faktor yang sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan BOS diantaranya adalah : Komunikasi yang efektif antar stakeholder terkait dimana saat ini komunikasi semakin mudah tidak ada batasan waktu dan jarak dengan media komunikasi yang ada saat ini, komitmen dan kerjasama yang kuat pihak Manajemen sekolah juga menjadi pendukung keberhasilan BOS”</p> <p>(Informan : Kadindikbud Nunukan)</p> <p>“Kalau saya mengamati faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah jiwa kerjasama yang dimiliki para guru dan staf administrasi sekolah serta substansi kebijakan BOS</p>	<p>“Kalau menurut saya, kerjasama menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan BOS, disamping itu juga kejelasan pedoman teknis BOS”</p> <p>(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan)</p> <p>“Menurut saya, faktor pendukung keberhasilan BOS yang paling utama adalah komitmen dari manajemen BOS, kalau komitmennya kuat insyaallah pelaksanaan BOS akan lancar, tidak ada penyimpangan”.</p> <p>(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan)</p>

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/Keterangan	
		Informan Kunci	Informan Pendukung
		yang memang berpihak ke masyarakat dalam mengatasi masalah terkait biaya pendidikan". (Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan)	
2	Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan BOS ?	<p>“Menurut saya faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan BOS di Nunukan diantaranya adalah :Keterbatasan sumberdaya manusia yang kompeten dibidang administrasi keuangan dan informasi teknologi, Sarana pendukung sekolah yang terbatas (komputer, jaringan internet, media penyebaran informasi), dan peran serta orang tua murif yang kurang aktif khususnya dalam perencanaan dan pengawasan” (Informan : Kadindikbud Nunukan)</p> <p>“Kalau saya mengamati faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan BOS adalah terbatasnya sarana sekolah dan terbatasnya guru dan tenaga administrasi yang menguasai administrasi keuangan dengan baik”. (Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan)</p>	<p>“Kalau menurut saya, peranserta orangtua peserta didik yang masih belum aktif menjadi faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan BOS, kami sebagai bagian dari Komite sekolah sudah berusaha memberikan edukasi dan sosialisasi ke mereka, namun samapai saat ini peransertanya belum tampak” (Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan)</p> <p>“Menurut saya, faktor pendukung penghambat keberhasilan BOS yang paling utama ketersediaan sarana sekolah dan SDM yang belum memadai dalam pengelolaan BOS, mestinya pengelola BOS di sekolah ditangani oleh orang professional selain guru sehingga tidak mengganggu aktivitas pembelajaran”. (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan)</p>